



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 25 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu diatur pedoman klasifikasi arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 1

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 2

Pedoman Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi kode-kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

## BAB II KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,  
ttd.  
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 25 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN

POLA KLASIFIKASI

000 UMUM

000 Umum

001 Lambang

- .1 Garuda
- .2 Bendera Kebangsaan
- .3 Daerah
  - .1 Propinsi
  - .2 Kabupaten
- .4 Bandir/Umbul-umbul

002 Tanda Kehormatan/ penghargaan untuk Pegawai Lihat 861.1

- .1 Bintang
- .2 Satyalencana
- .3 Satyakarya Nugraha
- .4 Penghargaan Secara Adat
- .5 Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura, dsb)
- .6 Monumen

003 Hari Raya/Besar

- .1 Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Anak, HKSN dsb)
- .2 Hari Raya Keagamaan
- .3 Hari Ulangtahun / HUT (Hari jadi Provinsi/Kabupaten/Kota)
- .4 Hari-hari Besar Internasional

004 Ucapan

- .1 Terimakasih
- .2 Selamat
- .3 Mohon diri
- .4 Belasungkawa
- .5 Ucapan lainnya

005 Undangan

006 Tanda Jabatan

- .1 Pamong praja
- .2 Pejabat lainnya
- .3 Tanda Pengenal

010 URUSAN DALAM

011 Gedung kantor/termasuk Instalasi prasarana fisik

- .1 Listrik
- .2 Telepon



- .3 Otomasi
- .4 Air Minum
- .5 Hidrant
- .6 Alarm
- .7 Internet
- 012 Rumah Dinas
  - .1 Tanah untuk Rumah Dinas
  - .2 Perabot Rumah Dinas
  - .3 Rumah Dinas Golongan I
  - .4 Rumah Dinas Golongan II
  - .5 Rumah Dinas Golongan III
  - .6 Rumah/Bangunan Lainnya
  - .7 Rumah Pejabat Negara
- 013 Akomodasi/Persinggahan (mess/wisma/hotel)
- 014 Rumah Susun/Apartemen
- 015 Peminjaman sarana dan prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, laptop, dll)
- 016 Pengurusan Kendaraan Dinas
- 017 Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
  - .1 Upacara Bendera
  - .2 Tata Tempat
    - .1 Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden
  - .3 Audiensi/Menghadap Pimpinan
    - .1 Alamat-alamat Kantor dan Pejabat
    - .2 Bandir/Umbul-umbul/Spanduk
  - .4 Penerimaan Tamu
  - .5 Kerjasama
- 020 BARANG DAN JASA
- 021 Penawaran
  - .1 Penawaran Barang
  - .2 Penawaran Jasa
- 022 Barang
  - .1 Barang Bergerak (Alat Angkutan)
  - .2 Barang Tidak Bergerak (ATK, Mesin Kantor dan Perabot Kantor)
- 023 Jasa
- 024 Pakaian Dinas
- 025 Senjata
- 027 Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjukkan lelang, dsb.
  - .1 Prakualifikasi : rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan / anwijzing, negosiasi, evaluasi
  - .2 SPK, Kontrak/Amandemen/Addendum, Teguran
  - .3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)



- .4 Serah terima pekerjaan
- .5 Pemeriksaan pekerjaan
- .6 Perpanjangan waktu/force majeure
- .7 Denda
- .8 Sanggahan
- .9 Pemeliharaan barang/jasa
- 028 Inventaris
  - .1 Pendataan Barang Milik Negara
  - .2 Pemeliharaan Barang Milik Negara
  - .3 Penghapusan Barang Milik Negara
- 030 KEKAYAAN DAERAH
- 031 Barang-barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak)
- 032 Barang-barang tidak bergerak(gedung, asrama, monumen / bangunan bersejarah, dll)
- 033 Tanaman
- 034 Alat-alat berat
- 035 Hewan
- 036 Barang persediaan dalam gudang
- 037 Alat pengangkut (Darat, Laut, Udara)
- 038 Peralatan Pabrik, Laboratorium
- 039 Peralatan Kesehatan/Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)
- 040 PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI
- 041 Perpustakaan
  - .1 Pameran Bahan Perpustakaan
  - .2 Pengolahan (Katalog, Bibliografi)
  - .3 Sirkulasi/Layanan
    - .1 Keanggotaan
    - .2 Peminjaman dan Pengembalian
  - .4 Deposit
  - .5 Pemeliharaan, Pelestarian/Alih Media
  - .6 Pembinaan Perpustakaan
    - .1 Bantuan Buku, Rak
  - .7 Penghapusan/penyusutan bahan perpustakaan
  - .8 Jenis-jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, Masyarakat)
  - .9 Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar perpustakaan
  - .10 Taman Bacaan Masyarakat
- 042 Dokumentasi
- 043 Kunjungan ke Perpustakaan
- 045 Kearsipan
  - .1 Pola Klasifikasi
  - .2 Akuisisi Arsip
  - .3 Penyusutan Arsip
    - .1 Jadwal Retensi Arsip
    - .2 Penilaian Arsip
    - .3 Pemindahan Arsip



- .4 Penyerahan Arsip
- .5 Pemusnahan Arsip
- .6 Berita Acara Penyusutan Arsip
- .7 Daftar Pertelaan
- .4 Pembinaan Kearsipan
  - .1 Pengawasan
  - .2 Bimbingan Kearsipan
- .5 Pemeliharaan, Pelestarian / Konservasi Arsip
  - .1 Fumigasi dan Termit Control
  - .2 Laminasi
  - .3 Alih Media
- .6 Layanan
- .7 Pemasyarakatan
  - .1 Pameran
  - .2 Penerbitan Naskah Sumber Arsip
  - .3 Sosialisasi Kearsipan
- .8 Pengembangan Sistem
  - .1 Sistem Kearsipan
  - .2 Sistem Jaringan Informasi Kearsipan
- .9 Pengawetan
- 046 Sandi
- 047 Telegram, Telex, Radio, ISB
- 048 Data Elektronik
  
- 050 PERENCANAAN  
Meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional),  
RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah),  
Musrenbang, Musrenbangpus antar Kementrian, Musrenbangnas, dan  
Musrenbangdes, Forum SKPD
  - .1 RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)
    - .1 RENSTRA (Rencana Strategi)
    - .2 RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
    - .3 RENSTRA BAPPEDA
  - .2 Program Nasional
    - .1 RKP (Rencana Kerja Pembangunan)
    - .2 RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga)
    - .3 RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
    - .4 Rencana Kerja SKPD
    - .5 KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara)
    - .6 Jawaban Gubernur atas pandangan fraksi
    - .7 Nota keuangan
    - .8 RKT (Rencana Kerja Tahunan)
    - .9 RKO (Rencana Kerja Operasional)
  - .3 Repelita
    - .1 Pelita Daerah
    - .2 Bantuan Pembangunan Daerah
    - .3 Bappeda
- 051 Laporan





- .1 Laporan berkala
- .2 LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
- 052 Evaluasi
  - .1 Evaluasi Rencana Strategis
    - .1 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
    - .2 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
    - .3 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota
    - .4 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 053 Proyek Bidang Pemerintahan
  - .1 Bidang Politik
  - .2 Bidang Keamanan dan Ketertiban
  - .3 Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - .4 Bidang Perekonomian
  - .5 Bidang Pekerjaan Umum
  - .6 Bidang Pengawasan
  - .7 Bidang Kepegawaian
  - .8 Bidang Keuangan
- 060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN
- .1 Program Kerja
- 061 Organisasi
  - .1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
  - .2 Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai
- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi Badan Internasional
- 064 Organisasi semi pemerintah
- 065 Ketatalaksanaan
  - .1 Tata Naskah Dinas
  - .2 Stempel dinas dan stempel jabatan
  - .3 Papan nama instansi pemerintah/non pemerintah
  - .4 Alamat-alamat kantor dan pejabat
  - .5 Ketentuan pakaian dinas dan atribut
- 066 Tata Hubungan Kerja
- 067 Standart Operasional Prosedur
- 068 Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan
- 069 Analisis Jabatan
  - .1 Pengukuran/Penilaian beban kerja Jabatan Struktural dan Fungsional
  - .2 Uraian Jabatan
- 070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- 071 Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai dengan laporan akhir riset
- 072 Pengembangan
  - .1 Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)
  - .2 SINAS (Sistem Inovasi Nasional)
  - .3 SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi, Cluster, Kab/Kota, desa, inovatif
  - .4 Inkubator Teknologi dan Bisnis
  - .5 Pameran produk inovasi/Ristek
  - .6 BTC (Bisnis Teknologi Center)



- .7 Rapterk (Penerapan Iptek)
- .8 HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual)
- 073 Kajian
  - .1 Kajian Strategis / Diskusi/Forum Group Discussion (FGD)
  - .2 Seminar
  - .3 Workshop
  - .4 Rapat Koordinasi/Rapat Teknik
  - .5 Lokakarya
  - .6 Diseminasi/sosialisasi hasil penelitian
- 074 Kerjasama Penelitian
  - .1 Instansi Pemerintahan Pusat/Daerah
  - .2 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
  - .3 Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
  - .4 Lembaga Internasional
- 075 Perekayasaan
- 076 Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)
- 077 Publikasi Ilmiah
  - .1 Jurnal Ilmiah
  
- 080 KONFERENSI / RAPAT KOORDINASI
- 081 Gubernur
- 082 Bupati/Walikota
- 083 Komponen Eselon Lainnya (termasuk Pimpinan SKPD)
- 084 Instansi lainnya (diluar Kemendagri)
- 085 Internasional di Dalam Negeri
- 086 Internasional di Luar Negeri
  
- 090 PERJALANAN DINAS
- 091 Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Daerah
- 092 Perjalanan Menteri ke Daerah
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
- 094 Perjalanan PNS, meliputi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Tugas
  
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
- 096 Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
  
- 100 PEMERINTAHAN
- 101 GDN (Gerakan Disiplin Nasional)
  
- 110 PEMERINTAHAN PUSAT
- 111 Presiden, Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah terima jabatan
  - .1 Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR
  - .2 Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan / Pidato
- 112 Wakil Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah terima jabatan
- 113 Susunan Kabinet
  - .1 Reshuffle
  - .2 Penunjukan Menteri ad intern



- .3 Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, Lihat 500.1
- 114 Kementrian Dalam Negeri
  - .1 Amanat Menteri Dalam Negeri
- 115 Kementrian lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)
- 117 Lembaga Non Kementrian
- 118 Otonomi Daerah
- 119 Kerjasama antar Kementrian
  
- 120 PEMERINTAH PROVINSI
  - .1 Kebijakan Pemerintah Provinsi
  - .2 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)
  - .3 Monografi, tambahkan kode wilayah
  - .1 Koordinasi
  - .11 Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - .12 Instansi Vertikal
  - .13 Kerjasama antar Provinsi/Daerah, dan Luar Negeri
- 121 Gubernur, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dsb
- 122 Wakil Gubernur, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dsb
- 123 Sekretaris Daerah, meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan
- 124 Badan-badan Pertimbangan Daerah, meliputi Muspida
- 125 Pembentukan / Pemekaran
  - .1 Pembentukan Daerah Otonom
  - .2 Pembentukan Wilayah
  - .3 Perubahan Batas Wilayah
  - .4 Pemekaran Wilayah
  - .5 Permasalahan Batas Wilayah
  - .6 Pemindahan Ibukota Provinsi
  - .7 Pemberian dan Penggantian nama Kota, Daerah, Jalan
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Penyerahan Urusan
- 128 Swapraja/Penataan Wilayah/Daerah
  
- 130 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
  - .0 .1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota
  - .0 .2 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati/Walikota (LKPJ)
  - .0 .3 Monografi
  - .0 .4 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
  - .1 Koordinasi
    - .1 .1 Satuan Kerja Perangkat Daerah
    - .1 .2 Instansi Vertikal
    - .1 .3 Kerjasama antar Provinsi / Daerah, dan Luar Negeri ( Sister City)
- 131 Bupati/Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
- 132 Wakil Bupati/Walikota, meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan, dan sebagainya
- 133 Sekretaris Daerah, meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah, Meliputi Muspida



- .1 Musppida
- .2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
- .3 Forum Koordinasin Lainnya
- .4 Kerjasama Antar Kabupaten/Kota
- 135 Pembentukan Daerah
  - .1 Pembentukan Daerah Otonom
  - .2 Pembentukan Wilayah
  - .3 Perubahan Batas Wilayah
  - .4 Pemekaran Wilayah
  - .5 Permasalahan Batas Wilayah
  - .6 Pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota
  - .7 Pemberian dan Penggantian nama Kota, Daerah, Jalan
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan
- 138 Pemerintah Wilayah Kecamatan
  - .1 Pembentukan Kecamatan
  - .2 Pemekaran Kecamatan
  - .3 Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
  - .4 Pemindahan Ibu kota Kecamatan
  - .5 Laporan Kecamatan
  - .6 Sambutan/Pengarahan/Amanat
  - .7 Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren
- 140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
- 141 Pamong Desa, Meliputi Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, penghasilan dsb
  - .1 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Kepala Desa
  - .2 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Desa
- 142 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kelurahan ( APBDes /Kel)
- 143 Kekayaan Desa : Bondo desa, tanah bengkok dll
- 144 Lembaga Tingkat Desa : Rembug Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LKMD
- 145 Administrasi Desa/Kelurahan : Monografi, Peta Rupa Bumi dll
- 146 Kewilayahan
  - .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
  - .2 Pemekaran Desa/Kelurahan
  - .3 Perubahan dan Perluasan Batas Wilayah Desa/ Kelurahan
  - .4 Perubahan Nama Desa/ Kelurahan
  - .5 Permasalahan Batas Desa/Kelurahan
  - .6 Penyatuan Desa/Kelurahan
  - .7 Penghapusan Desa/ Kelurahan
  - 8 Kerjasama Antar Desa/Kelurahan
- 147 RT-RW
- 148 Perangkat Kelurahan
  - .1 Lurah
  - .2 Sekretaris Kelurahan
  - .3 Staff Kelurahan
- 149 Dewan Kelurahan



- 150 LEGISLATIF MPR/DPR/DPD
- 151 Keanggotaan MPR
  - .1 Pencalonan
  - .2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
  - .3 Pemberhentian
    - .1 Recall
    - .2 Meninggal
  - .4 Pelanggaran
  - .5 Penggantian Antarwaktu
- 152 Keanggotaan DPR
  - .1 Pencalonan
  - .2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
  - .3 Pemberhentian
    - .1 Recall
    - .2 Meninggal
  - .4 Pelanggaran
  - .5 Penggantian Antarwaktu
- 153 Keanggotaan DPD
  - .1 Pencalonan
  - .2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
- 154 Persidangan
- 155 Kesejahteraan
  - .1 Keuangan
  - .2 Penghargaan
- 156 Hak
- 157 Jawaban Pemerintah
- 158 Peninjauan/Kunjungan Lapangan
- 159 Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
  
- 160 DPRD PROVINSI
- 161 Keanggotaan
  - .1 Pencalonan
  - .2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
  - .3 Pelanggaran
  - .4 Pemberhentian Antar waktu
    - .1 Meninggal Dunia
    - .2 Mengundurkan Diri
    - .3 Diberhentikan
  - .5 Alat Kelengkapan Dewan
    - .1 Pimpinan
    - .2 Badan Musyawarah
    - .3 Komisi
    - .4 Badan Legislasi Daerah
    - .5 Badan Anggaran
    - .6 Badan Kehormatan
    - .7 Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
- 162 Persidangan
  - .1 Rapat-rapat
    - .1 Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
    - .2 Rapat Pimpinan DPRD
    - .3 Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus



- .4 Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
- .5 Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
- .6 Rapat Fraksi
- .2 Fraksi
- .3 Tata tertib
- .4 Kode etik
- .5 Reses
- .6 Peninjauan/Kunjungan Lapangan
- .7 Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
- 163 Kesejahteraan
  - .1 Keuangan
  - .2 Penghargaan
- 164 Hak
- 165 Sekretaris DPR Provinsi
  
- 170 DPRD KABUPATEN/KOTA
- 171 Keanggotaan
  - .1 Pencalonan
  - .2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
  - .3 Pelanggaran
  - .4 Pemberhentian Antar waktu
    - .1 Meninggal Dunia
    - .2 Mengundurkan Diri
    - .3 Diberhentikan
  - .5 Alat Kelengkapan Dewan
    - .1 Pimpinan
    - .2 Badan Musyawarah
    - .3 Komisi
    - .4 Badan Legislasi Daerah
    - .5 Badan Anggaran
    - .6 Badan Kehormatan
    - .7 Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
- 172 Persidangan
  - .1 Rapat-rapat
    - .1.1 Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
    - .2 Rapat Pimpinan DPRD
    - .3 Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
    - .4 Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
    - .5 Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
    - .6 Rapat Fraksi
  - .2 Fraksi
  - .3 Tata tertib
  - .4 Kode etik
  - .5 Reses
  - .6 Peninjauan/Kunjungan Lapangan
  - .7 Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
- 173 Kesejahteraan
  - .1 Keuangan
  - .2 Penghargaan



180 HUKUM

- .1 Konstitusi
  - .1 Dasar Negara
  - .2 Undang Undang Dasar
  - .3 Undang Undang
  - .4 Perauran Pemerintah
  - .5 Keppres/Perpres/Inpres
  - .6 Kepmen/Permen/Inmen
  - .7 Perundangan Tingkat Provinsi meliputi, Perda, Kpgub / Pergub / Ingub
  - .8 Perundangan Tingkat Kabupaten, Meliputi Perda, KepBup / KepWal / PerBup / PerWal
  - .9 Perundangan Tingkat Desa Meliputi, Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa
- .2 Tap MPR
- .3 Konvensi

181 Perdata

- .1 Tanah
- .2 Rumah
- .3 Utang/Piutang
  - .1 Gadai
  - .2 Hipotik
- .4 Notariat

182 Pidana

- .1 Tindak Pidana Hukum
- .2 Tindak Pidana Khusus
- .3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

183 Peradilan

- .1 Jenis-Jenis Peradilan
  - .1 Peradilan Umum
    - .1 Peradilan Negeri Tingkat Pertama
    - .2 Peradilan Tinggi
    - .3 Mahkamah Agung
  - .2 Peradilan Agama Islam
    - .1 Peradilan Agama Islam Tingkat Pertama
    - .2 Peradilan Tinggi Agama Islam
    - .3 Mahkamah Islam Agung
  - .3 Peradilan Militer
    - .1 Mahkamah Militer Tingkat Pertama
    - .2 Mahkamah Militer Tinggi
    - .3 Mahkamah Militer Agung
  - .4 Peradilan Tata Usaha Negara
    - .1 Pengadilan Tata Usaha Tingkat Pertama
    - .2 Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara
    - .3 Mahkamah Tata Usaha Negara Agung
  - .5 Peradilan Tindak Pidana Korupsi
  - .6 Peradilan Hak Asasi Manusia
  - .7 Mahkamah Konstitusi
  - .8 Komisi Yudisial
  - .9 Ombustmen



- .2 Upaya Hukum
  - .1 Banding
  - .2 Kasasi
  - .3 Derden Verset
  - .4 Peninjauan Pembeli
  - .5 Grasi, amnesti,abolisi
- .3 Eksekusi
- .4 Pembinaan Hukum, meliputi kadarkum
- .5 Bantuan Hukum, meliputi LBH
- 184 Hukum Internasional
- 185 Imigrasi
  - .1 Visa
  - .2 Paspor
  - .3 Exit
  - .4 Reentry
  - .5 Lintas Batas/Batas Antar Negara
- 186 Kepenjaraan
  - .1 Registrasi Narapidana
  - .2 Pembinaan Narapidana
  - .3 Pembebasan Narapidana
  - .4 Tahanan Titipan
- 187 Kejaksaan
  - .1 Penuntutan Umum
  - .2 Penuntutan Khusus
- 188 Hukum Adat
  - .1 Tokoh Adat/Masyarakat
- 189 Peraturan Perundang-undangan
  - .1 MPR
  - .2 Undang-undang
  - .3 Peraturan TAP
    - .1 Peraturan Pemerintah
    - .2 Peraturan Menteri
    - .3 Peraturan Lembaga Non Departemen
    - .4 Peraturan Daerah
      - .1 Peraturan Provinsi
      - .2 Peraturan Kabupaten/Kota
  - .4 Keputusan
    - .1 Presiden
    - .2 Menteri
    - .3 Lembaga Non Departemen
    - 4 Gubernur
    - .5 Bupati/Walikota
  - .5 Instruksi
    - .1 Presiden
    - .2 Menteri
    - .3 Lembaga Non Departemen
  - .6 Standar Operasional Prosedur
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI
- 191 Perwakilan Asing
- 192 Tamu Negara
- 193 Kerjasama Diplomatik Dengan Negara Asing





- .1 ASEAN
- .2 Bantuan Luar Negeri/Hibah
- 194 Perwakilan RI Diluar Negri
- 195 PBB
- 196 Laporan Luar Negeri
  
- 200 POLITIK
- 201 Perencanaan Dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri
  - .1 Pembinaan Dan Pemahaman Ideologi Negara
  - .2 Kesatuan Bangsa
  - .3 Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri Termasuk  
Laporannya
  - .4 Keadaan Politik Luar Negeri
  - .5 Evaluasi Dan Pegawasan Pembinaan Ipoleksosbut hankam
  - .6 Orde Baru
  - .7 Orde Reformasi
- 202 Kebijakanaksanaan Umum
  
- 210 KEPARTAIAN
- 211 Partai politik
  - .1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
  - .2 Program Kerja, Data Kegiatan PARPOL
  - .3 Pembinaan PARPOL
  - .4 Hasil Munas/Musda PARPOL
  - .5 Struktur/Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL
  
  - .6 Data Inventaris Dan Keuangan PARPOL
- 212 Partai/Organisasi Terlarang
  - .1 Keputusan Pembubaran Partai/Organisai Terlarang
  - .2 Daftar Dan Data Pengurus Anggota Partai/Organisai Terlarang
  - .3 Ijin Meninggalkan Tempat/Domisili Bagi Anggota Partai/Organisasi
  - .4 Daftar Berkala Mengenai Keadaan Anggota Partai/Organisasi  
Terlarang
  - .5 Laporan Umum Mengenai Keadaan Anggota Partai/Organisai  
Terlarang
  
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- 221 Pembentukan Organisasi
  - .1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
  - .2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
  - .3 Program Kerja Organisasi
  - .4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 222 Pembinaan Organisasi
  - .1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
  - .2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
- 223 Berdasarkan Perjuangan
  - .1 Perintis Kemerdekaan
  - .2 Angkatan 45
  - .3 Veteran
- 224 Berdasarkan Kekayaan
  - .1 PEPABRI
  - .2 Wredatama



- 225 Berdasarkan Kerohanian
- 226 Lembaga Adat
  
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 231 Pembentukan Organisasi
  - .1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
  - .2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
  - .3 Program Kerja Organisasi
  - .4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 232 Pembinaan Organisasi
  - .1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
  - .2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
- 233 Ikatan Dokter Indonesia
- 234 Persatuan Guru Republik Indonesia
- 235 Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
  - .1 Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- 236 Persatuan Advokat Indonesia
- 237 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
- 238 Organisasi Profesi dan Fungsional Lainnya
  - .1 Persatuan Advokat Indonesia
  - .2 Korps Pegawai Republik Indonesia
- 239 Jabatan Fungsional Lain
  - .1 Arsiparis
  - .2 Pustakawan
  
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 241 Pembentukan Organisasi
  - .1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
  - .2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
  - .3 Program Kerja Organisasi
  - .4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 242 Pembinaan Organisasi
  - .1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
  - .2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
- 243 Komite Nasional Pemuda Indonesia
- 244 Organisasi Mahasiswa
- 245 Organisasi Pelajar
- 246 Gerakan Pemuda Ansor
- 247 Gerakan Pemuda Islam Indonesia
- 248 Gerakan Pemuda Marhaenis
  
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
- 251 Pembentukan Organisasi
  - .1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
  - .2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
  - .3 Program Kerja Organisasi
  - .4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 252 Pembinaan Organisasi
  - .1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
  - .2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi



- 253 Federasi Buruh Seluruh Indonesia
- 254 Organisasi Buruh Internasional
- 255 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
- 256 Keluarga Supir Proporsional Seluruh Indonesia (SPSI)
- 257 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
  
- 260 ORGANISASI WANITA
- 261 Pembentukan Organisasi
  - .1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
  - .2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
  - .3 Program Kerja Organisasi
  - .4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 262 Pembinaan Organisasi
  - .1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
  - .2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
- 263 Dharma Wanita
- 264 Persatuan Wanita Indonesia
- 265 Pemberdayaan Perempuan (wanita)
- 266 Kongres Wanita
  
- 270 PEMILU (PEMILIHAN UMUM) PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)
- 271 Pencalonan
- 272 Nomor Urut/Tanda Gambar
- 273 Kampanye
  - .1 Dana Kampanye
- 274 Petugas Pemilu
- 275 Pemilih/Daftar Pemilih
- 276 Sarana
  - .1 TPS
  - .2 Kendaraan
  - .3 Surat Suara
  - .4 Kotak Suara
- 277 Pemungutan Suara/Perhitungan Suara
- 278 Hasil Pemilu
  - .1 Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif
  - .2 Penetapan pemenang pilkada
  - .3 Pengambilan sumpah/janji Anggota MPR, DPR, DPD
- 279 KPU/KPUD
  
- 280 PENGAWASAN PEMILU/PILKADA
- 281 Pemantauan
- 282 Pelanggaran
- 283 Sengketa
- 284 Panwaslu
  
- 300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
  - .1 Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
  - .2 Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
  - .3 Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ancaman
  - .4 Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan
- 301 Koordinasi dan Kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)



- 302 Pengawasan Trantibum
- 303 Penegakan Pelaksanaan Perda
- 304 Pembinaan / Penyuluhan pelanggaran Perda
- 305 Patroli Wilayah
- 306 Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing
  - .1 Pengamanan
  - .2 Pengawalan
- 307 Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan , ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
  
- 310 PERTAHANAN
- 311 Darat
- 312 Laut
- 313 Udara
- 314 Ketahanan Bangsa
- 315 Katahanan Ekonomi
- 316 Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
  
- 320 KEMILITERAN/TNI
- 321 Latihan Militer
- 322 Wajib Militer
- 323 Operasi Militer
- 324 Kekayaan TNI
  - .1 AMD
- 325 Kemanunggalan TNI dengan Rakyat
  
- 330 KEAMANAN
- 331 Kepolisian
  - .1 Polisi Pamong Praja
- 332 Huru-Hara/Demonstrasi
- 333 Senjata Api/Tajam
- 334 Bahan Peledak
- 335 Perjudian
- 336 Surat-surat Kaleng
- 337 Pengaduan Masyarakat
- 338 Himbauan atau Larangan
  
- 340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
  - .1 Kebijakan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas
- 341 Pembinaan dan Diklat
  - .1 Pengangkatan / Pemberhentian anggota Linmas
  - .2 Pendidikan/latihan Linmas
  - .3 Pelatihan PAM Swakarsa
  - .4 Pendidikan/Latihan MENWA
- 342 Pengerahan dan pengendalian Linmas
- 343 Kesejahteraan bagi anggota Linmas
  - .1 Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas
  - .2 Bantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas
  - .3 Santunan uang duka bagi anggota Linmas
  - .4 Penghargaan bagi anggota Linmas
- 344 Data Linmas, MENWA, PAM Swankarsa
  - .1 Linmas Lanjut Usia
- 345 Orientasi Kesadaran Bela Negara



- 346 Kegiatan Pelaksanaan Linmas
- 350 KEJAHATAN
- 351 Makar/Pemberontakan/Terrorisme
- 352 Pembunuhan
- 353 Penganiayaan/Pencurian/Perampasan
- 354 Subversi/penyelundupan/Narkotika
- 355 Penipuan dan Pemalsuan
- 356 Korupsi/penyelewengan/penyalahgunaan jabatan
- 357 Kekerasan pada perempuan dan anak
  - .1 Pelaporan
  - .2 Penanganan Korban
- 358 Kenakalan
- 359 Kejahatan lainnya (trafficking, hipnotis, dll)
- 360 BENCANA
  - .1 Pelatihan
  - .2 Surat Keputusan
  - .3 Berita Acara
- 361 Gunung Merapi/Gempa/Tsunami
- 362 Banjir/Tanah Longsor
- 363 Angin Topan
- 364 Kebakaran
  - .1 Pemadaman Kebakaran
- 365 Kekeringan
- 366 Posko Bencana
- 367 Koordinasi / Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
- 368 MOU Pemerintah Pusat BNPB
- 370 KECELAKAAN
- 371 Latihan SAR
- 372 Latihan Ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam
- 373 Pelatihan manajemen bagi pejabat
- 374 Satkorlak dan Satlak PBP
- 375 Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP
- 376 Latihan Ketrampilan pemadam kebakaran
- 377 Kecelakaan Darat, Laut, Udara
- 378 Investigasi/ Penyelidikan Kecelakaan
- 379 Asuransi kecelakaan
- 380 PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
- 381 Perencanaan
  - .1 Perencanaan Teknis
  - .2 Rekomendasi
- 382 Bantuan Bencana
- 383 Penanggulangan Bencana dengan pihak lain
- 384 Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
- 385 PUSDALOPS
- 386 Kunjungan lapangan
- 387 Relawan
- 388 Laporan Bencana
- 390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN



- 391 Instansi pemerintah Pusat
- 392 Instansi pemerintah di daerah
- 393 Lembaga International
- 394 Lembaga non pemerintah nasional
  
- 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 401 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat
- 402 Keluarga Miskin
  
- 410 PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN
- 411 Gotong-royong
  - .1 Swadaya gotong royong
    - .1 Pembinaan
    - .2 Pungutan
  - .2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
  - .3 Latihan kerja masyarakat
  - .4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
  - .5 Penyuluhan Masyarakat Desa
  - .6 Kelembagaan Desa
  - .7 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- 412 Perekonomian Desa
  - .1 Produksi Desa
    - .1 Pengolahan
    - .2 Pemasaran
  - .2 Pembiayaan Pembangunan Desa
    - .1 Inventarisasi Data
    - .2 Petunjuk/ Pembinaan Pelaksanaan
    - .3 Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan
    - .4 Bantuan/ Stimulasi/ADD
    - .5 Perkreditan Desa
    - .6 Pelaporan
    - .7 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
  - .3 Koperasi Desa
    - .1 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
    - .2 Koperasi Unit Desa (KUD)
  - .4 Keuangan
    - .1 Perkreditan Desa
    - .2 Inventarisasi Data
    - .3 Perkembangan/Pelaksanaan
    - .4 Bantuan/Stimulus
    - .5 Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
  - .5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
    - .1 Pusat
    - .2 Daerah
  - .6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
    - .1 Bantuan Langsung
    - .2 Bantuan Keserasian
    - .3 Bantuan Juara Lomba Desa
- 413 Sarana dan Prasarana Desa
  - .1 Prasarana Desa
    - .1 Pembinaan
    - .2 Bimbingan Teknis



- .2 Pemukiman kembali penduduk
  - .1 Lokasi
  - .2 Diskusi
  - .3 Pelaksanaan
- .3 Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa
  - .1 Rumah Sehat
  - .2 Proyek Perintis
  - .3 Pelaksanaan
  - .4 Pengembangan
  - .5 Perbaikan Kampung
- .4 Perbaikan Kampung
- .5 Teknologi Tepat Guna (TTG)
- .6 Masyarakat Pradesa
  - .1 Pembinaan
  - .2 Penyuluhan
- 414 Pengembangan Desa
  - .1 Tingkat Perkembangan Desa
    - .1 Jumlah Desa
    - .2 Pemekaran Desa
    - .3 Pembentukan Desa Baru
    - .4 Evaluasi
    - .5 Bagan
  - .2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)
    - .1 Penyuluhan Program
    - .2 Lokasi UDKP
    - .3 Pelaksanaan
    - .4 Bimbingan/Pembinaan
    - .5 Evaluasi
  - .3 Tata Desa
    - .1 Inventarisasi
    - .2 Penyusunan Pola Tata Desa
    - .3 Aplikasai Tata Desa
    - .4 Pemetaan
    - .5 Pedoman Pelaksanaan
    - .6 Evaluasi
  - .4 Perlombaan Desa dan Kelurahan
    - .1 Pedoman
    - .2 Penilaian
    - .3 Kejuaraan
    - .4 Piagam
  - .5 Pemukiman Kembali Penduduk
    - .1 Lokasi
    - .2 Diskusi
    - .3 Pelaksanaan
  - .6 Masyarakat Pradesa
    - .1 Pembinaan
    - .2 Penyuluhan
  - .7 Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
    - .1 Rumah Sehat
    - .2 Proyek Perintis
    - .3 Pelaksanaan
    - .4 Pengembangan



- .5 Perbaikan Kampung
- 415 Koordinasi
  - .1 Sektor Khusus
  - .2 Rapat Koordinasi
  - .3 Tim Koordinasi Pusat
  - .4 Kerjasama
    - .1 Luar Negeri
    - .2 Perguruan Tinggi
    - .3 Kementrian / Lembaga Pemerintah
    - .4 Lembaga Lainnya
- 420 PENDIDIKAN
  - .1 Pendidikan Khusus
  - .2 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Pendidikan
  - .3 Pendidikan Karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb
  - .4 Pendidikan Kemasyarakatan
- 421 Sekolah (termasuk akreditasi)
  - .1 Pra sekolah (PAUD, Playgroup)
  - .2 Sekolah Dasar
  - .3 Sekolah Menengah
  - .4 Sekolah Kejuruan
  - .5 Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)
  - .6 Kegiatan sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum
  - .7 Kegiatan pelajar diantaranya reuni, darmawisata, widyawisata, lomba-lomba (LKS, Olimpiade olah raga dan sains), Pelajar teladan Pertukaran pelajar
  - .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
  - .9 Pendidikan Luar Sekolah/ Pemberantasan Buta Huruf
- 422 Administrasi Sekolah
  - .1 Persyaratan masuk sekolah, testing ujian, OSPEK
  - .2 Tahun Pelajaran
  - .3 Hari Libur
  - .4 Uang sekolah, diantaranya SPP, SPI
  - .5 Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi
  - .6 Ijazah, Sertifikat
  - .7 Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM)
- 423 Metode Belajar
  - .1 Kuliah
  - .2 Ceramah, Simposium, Seminar
  - .3 Diskusi
  - .4 Kuliah Lapangan, KKN, Magang / Praktek/ PKL
  - .5 Kurikulum
  - .6 Karya Tulis, Karya Ilmiah
  - .7 Ujian
- 424 Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru / dosen teladan, Guru/dosen berprestasi)
  - .1 Pertukaran Guru ke Luar Negeri
  - .2 Sertifikasi Guru
- 425 Sarana Pendidikan
  - .1 Bangunan Pendidikan
    - .1 Gedung Sekolah





- .2 Kampus
- .3 Pusat Kegiatan
- .4 Perpustakaan
- .5 Laboratorium
- .2 Buku
- .3 Perlengkapan Pendidikan
- .4 Sistem Informasi pendidikan
- .5 Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
- 426 Keolahragaan
  - .1 Pembina Keolahragaan
    - .1 Olah Raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade)
    - .2 Olah Raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll)
    - .3 Olah Raga Rekreasi / Massal (Senam, sepeda santai, olah raga tradisional)
    - .4 Iptek dan Industri Olah Raga
    - .5 Sarana Prasarana Keolahragaan
  - .2 Pesta Olahraga
  - .3 Kemitraan Olah Raga
  - .4 KONI
- 427 Kepemudaan
  - .1 Pertukaran Pemuda
  - .2 Paskibraka
  - .3 Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja
  - .4 Kemitraan Pemuda
  - .5 Karang Taruna
- 428 Kepramukaan/ Kependuan
- 429 Pendidikan Kedinasan Untuk Departemen Dalam Negeri
- 430 KEBUDAYAAN
  - .1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kebudayaan
  - .2 Pembinaan bidang kebudayaan
- 431 Kesenian
  - .1 Cabang Kesenian (Seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis dll)
  - .2 Sarana
    - .1 Gedung Kesenian
    - .2 Padepokan
    - .3 Lembaga Adat
    - .4 Kegiatan adat/ tradisi
- 432 Kepurbakalan
  - .1 Museum
  - .2 Peninggalan kuno
    - .1 Candi, termasuk pemugaran
    - .2 Benda
- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Usaha Pertunjukan, hiburan, kesenangan
- 436 Penghayat Kepercayaan
- 440 KESEHATAN
  - .1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesehatan
- 441 Pembinaan Kesehatan



- .1 Gigi
  - .2 Mata
  - .3 Jiwa
  - .4 Kanker
  - .5 UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
  - .6 Perawatan
  - .7 Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb
  - .8 Kesehatan Ibu dan Anak
  - .9 JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
    - .1 JAMKESMAS
    - .2 JAMKESDA
    - 3 JAMPERSAL
    - .4 Jaminan lainnya
  - .10 Pekan Imunisasi Nasional
- 442 Obat-obatan
- .1 Pengadaan
  - .2 Pemeriksaan Obat
  - .3 Penyimpanan Obat
  - .4 Distribusi Obat
  - .5 Pengawasan Obat
    - .1 Obat Generik
    - .2 Obat Terlarang
    - .3 Pemalsuan Obat
- 443 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit
- .1 Pencegahan Penyakit
  - .2 Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P.2.M.L)
    - .1 Kusta
    - .2 Kelamin, HIV, AIDS, IMS
    - .3 Frambusia
    - .4 T.B.C
    - .5 Kholera
    - .6 SARS, dan Jenis penyakit lainnya
  - .3 Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
    - .1 Malaria
    - .2 Dengue Haemorrhagic Fever (DHF), DBD
    - .3 Filaria
    - .4 Serangga
    - .5 Rabies
    - .6 Antrak
    - .7 Leptosirosis
    - .8 Chikungunya
    - .9 Penyakit Lainnya
  - .4 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
    - .1 A. Pektoris
    - .2 IMA (Irama Mastcmik Akut)
    - .3 Hipertensi
    - .4 Stroke
    - .5 Diabetes Melitus
    - .6 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit C.A Serviks
    - .7 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit C.A Mammae
    - .8 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit C.A Hepar



- .5 Epidemiology dan Karantina (Epidka)
  - .1 Imunisasi
  - .2 Surveilanse
  - .3 Pestisida
  - .4 Pencemaran Udara
  - .5 Jamban Keluarga
  - .6 Kesehatan Institusi
- .6 Higiene sanitasi
  - .1 Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM), jasa boga
  - .2 Sarana air minum
  - .3 Pestisida, insektisida
  - .4 Pencemaran
  - .5 Jamban Keluarga, sanitasi rumah tangga
  - .6 Kesehatan Institusi, misal : Poskestren, sanitasi masjid dll
  - .7 Higiene sanitasi C.A Mammae
  - .8 Higiene sanitasi C.A Hepar
  - .9 Higiene sanitasi C.A Paru
- .7 Kejadian Khusus
  - .1 Dekompensasiokordosis (serangan jantung)
  - .2 Asma
  - .3 Psikosis
  - .4 PPOM
  - .5 Kecelakaan Lalu Lintas
  - .6 Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 444 Gizi dan Pengawasan Makanan
  - .1 Kekurangan makanan
  - .2 Bahaya Kelaparan, Busung Lapar, Gizi Buruk
  - .3 Keracunan Makanan
  - .4 Menu Makanan Rakyat
  - .5 Gondok endemik (GAKI)
- 445 RSUD, RSJ, RS Khusus
  - .1 Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum)
    - .1 Rawat Inap
    - .2 Rawat Jalan
    - .3 IGD
    - .4 IBS
    - .5 ICU
    - .6 MCU (Medical Check Up)
  - .2 Penunjang Medis
    - .1 Farmasi
    - .2 Rekam Medik
    - .3 Radiologi
    - .4 Gizi
    - .5 Laboratorium Klinik
    - .6 Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik
    - .9 CSSD/ Laundry
  - 3 Keperawatan
  - .4 Komite Medik



- .5 SPI (Satuan Pengawas Internal)
- .6 Mutu Rumah Sakit
  - .1 Akreditasi
  - .2 ISO
  - .3 PSBH (Problem Solving for Better Hospital)
  - .4 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- .7 IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
- .8 Promosi layanan Kesehatan
- .9 Kasus Hukum Rumah Sakit
- 446 Tenaga Medis
  - .1 Perencanaan Tenaga Medis
  - .2 Pendayagunaan Tenaga Medis
    - .1 Perijinan untuk Tenaga Medis
    - .2 Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
    - .3 TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
  - .3 Diklat Tenaga Kesehatan/ Medis
  - .4 Diklat Tenaga Kesehatan/ Para Medis
  - .5 Pendidikan di bidang kesehatan termasuk pendidikan spesialis
- 447 Peralatan Kesehatan
  - .1 Standarisasi
  - .2 Penyimpanan
  - .3 Distribusi
  - .4 Perijinan berkaitan dengan alat kesehatan
- 448 Pengobatan Alternatif
  - .1 Pijat
  - .2 Akupunktur
  - .3 Jamu dan Herbal
  - .4 Dukun
- 449 Lembaga penyedia layanan kesehatan
  - .1 PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling
  - .2 Poliklinik dan Balai Kesehatan
  - .3 Rumah Bersalin
  - .4 Posyandu
  - .5 Laboratorium Kesehatan
  - .6 Apotik
  - .7 Sanatorium Kesehatan
- 450 AGAMA
  - .1 Kebijakan dan program pemerintahan dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan
  - .2 Bantuan dibidang keagamaan
- 451 Islam
  - .1 Peribadatan
    - 1 Sholat
    - .2 Zakat, Infaq, shodaqoh
    - .3 Puasa
    - .4 Umroh dan Haji
    - .5 MTQ
  - .2 Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau)
  - .3 Tokoh Agama
  - .4 Pendidikan Agama
    - .1 Pendidikan Tinggi Agama



- .2 Menengah, MTs, MA
- .3 Dasar, Pra Sekolah, MI
- 4 Lembaga pendidikan Non Formal (TPQ/ Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll)
- .5 Sarana pendidikan meliputi buku, gedung sekolah dll
- .6 Tenaga Pengajar
- .7 Dakwah (Pengajian, MPQ)
- .5 Wakaf
- .6 Mazhab Agama Islam
- .7 Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hijab Rukyat dll)
- .8 Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)
- .9 Peradilan
- 452 Kristen Protestan
  - .1 Peribadatan
  - .2 Rumah Ibadah Gereja dll
  - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll)
  - .4 Mazhab Agama Kristen Protestan
  - .5 Organisasi Gerejani
- 453 Khatolik
  - .1 Peribadatan
  - .2 Rumah Ibadah Gereja dll
  - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
  - .4 Mazhab Agama Khatolik
  - .5 Organisasi Gerejani
- 454 Hindu
  - .1 Peribadatan
  - .2 Rumah Ibadah Pura dll
  - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
  - .4 Mazhab Agama Hindu
  - .5 Organisasi Agama Hindu
- 455 Budha
  - .1 Peribadatan
  - .2 Rumah Ibadah Candi, Vihara dll)
  - 3 Tokoh Agama, Rohaniawan
  - .4 Mazhab Agama Budha
  - .5 Organisasi Agama Budha
- 456 Urusan Haji
  - .1 ONH
  - .2 Manasik
- 457 Kong Hu Cu
  - .1 Peribadatan
  - .2 Rumah Ibadah Klenteng dll
  - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
  - .4 Mazhab Agama Kong Hu Cu
  - .5 Organisasi Agama Kong Hu Cu
- 460 SOSIAL
- 461 Rehabilitasi Penyandang Cacat
  - .1 Cacat Ganda
  - .2 Cacat Fisik
  - .3 Cacat Mental



- .4 Cacat Mata
- .5 Bisu/Tuli
- 462 Rehabilitasi Sosial
  - .1 Gelandangan/ Orang Terlantar, anak jalanan
  - .2 Pengemis
  - .3 Tuna Susila
  - .4 Anak Nakal
  - .5 Tuna Wisma
- 463 Kesejahteraan anak dan keluarga
  - .1 Kesejahteraan anak
    - .1 Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
    - .2 Perlindungan Anak
    - .3 Anak Asuh
  - .2 Kualitas Hidup Perempuan
    - .1 Perlindungan Perempuan
    - .2 Ibu Teladan
    - .3 Pengarusutamaan Gender (PUG)
  - .3 Anak Putus Sekolah
- 464 Keperintisan dan Kepahlawanan
  - .1 Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya
  - .2 Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada perintis kemerdekaan
  - .3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
  - .1 Lanjut Usia
  - .2 Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi
  - .3 Masyarakat miskin : Raskin, BLT dll
- 466 Sumbangan Sosial
  - .1 Korban Bencana
    - .1.1 Jaminan Sosial
  - .2 Pencarian dana untuk sumbangan : penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazar dll
  - .3 Panti Asuhan
  - .4 Panti Jompo
- 467 Bimbingan Sosial
  - .1 Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya
- 468 PMI
- 469 Makam
  - .1 Umum
  - .2 Pahlawan
  - .3 Khusus, Keluarga, Raja
  - .4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
  - .1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan
- 471 Pendaftaran Penduduk
  - .1 Identitas Penduduk
    - .1 Biodata
    - .2 Nomor Induk Kependudukan



- .3 Kartu Tanda Penduduk
- 4 Kartu Keluarga
- 5 Advokasi Identitas Penduduk
- .2 Perpindahan Penduduk dalam wilayah Indonesia
  - .1 Perpindahan penduduk WNI
  - .2 Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia
  - .3 Perpindahan penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
  - .4 Daerah terbelakang
  - .5 Bedol Desa
- .3 Perpindahan penduduk antar Negara
  - .1 Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
  - .2 Orang asing tinggal sementara
  - .3 Orang asing tinggal tetap
  - .4 Perpindahan penduduk antar negara di wilayah perbatasan antar negara (pelintas batas tradisional)
- .4 Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan
  - .1 Akibat bencana alam
  - .2 Akibat kerusuhan sosial
  - .3 Pendaftaran penduduk daerah terbelakang
  - .4 Pendaftaran penduduk rentan
- 472 Pencatatan Sipil
  - .1 Kelahiran kematian dan advokasi
    - .1 Kelahiran
    - .2 Kematian
    - .3 Advokasi
  - .2 Perkawinan, perceraian dan advokasi
    - .1 Perkawinan agama Islam
    - .2 Perkawinan agama non Islam
    - .3 Perceraian agama Islam
    - 4 Perceraian agama non Islam
    - .5 Advokasi
  - .3 Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi
    - .1 Pengangkatan anak
    - .2 Pengakuan anak
    - .3 Pengesahan anak
    - .4 Perubahan akta
    - .5 Pembatalan akta
    - 6 Advokasi
  - .4 Pencatatan Kewarganegaraan
    - .1 Akibat perkawinan
    - .2 Akibat kelahiran
    - .3 Non Perkawinan/ Non Kelahiran
    - .4 Naturalisasi
    - .5 Perubahan WNI ke WNA
- 473 Informasi Kependudukan
  - .1 Teknologi Informasi
    - .1 Perangkat Keras
    - .2 Perangkat Lunak
    - .3 Jaringan Komunikasi Data
  - .2 Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi
    - .1 Daerah Maju



- .2 Daerah Berkembang
- .3 Daerah Terbelakang
- .3 Pengolahan Data Kependudukan
  - .1 Pendaftaran penduduk
  - .2 Kejadian vital penduduk
  - .3 Penduduk non registrasi
- .4 Pelayanan informasi kependudukan
  - .1 Media Elektronik
  - .2 Media Cetak
  - .3 Outlet
- 474 Perkembangan Penduduk
  - .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
    - .1 Struktur Jumlah
    - .2 Komposisi
    - .3 Fertilitas
    - .4 Kesehatan Reproduksi
    - .5 Morbiditas Penduduk
    - .6 Mortalitas Penduduk
  - .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
    - .1 Anak dan Remaja
    - .2 Penduduk Usia Produktif
    - .3 Penduduk Lanjut Usia
    - .4 Gender
  - .3 Penataan Persebaran Penduduk
    - .1 Migrasi antar wilayah
    - .2 Urbanisasi
    - .3 Migrasi Internasional
    - .4 Sementara
    - .5 Migrasi Non Permanen
  - .4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
    - .1 Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk
    - .2 Pelayanan Kelembagaan Ekonomi
    - .3 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
    - .4 Partisipasi Masyarakat
  - .5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
    - .1 Pendidikan Jalur Sekolah
    - .2 Pendidikan Jalur Luar Sekolah
    - .3 Pendidikan Jalur Masyarakat
    - .4 Pembangunan Berwawasan Kependudukan
- 475 Transmigrasi
  - .1 Penyiapan informasi daerah transmigrasi
    - .1 Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi
    - .2 Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi
    - .3 Pemasyarakatan / sosialisasi transmigrasi
    - .4 Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi
    - .5 Publikasi transmigrasi melalui pemeran dan kesenian
    - .6 Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi
    - .7 Kerjasama di bidang transmigrasi
    - .8 Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik





- .2 Pemukiman Transmigrasi
  - .1 Penggunaan Tanah Pemukiman Transmigrasi
  - .2 Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi
  - .3 Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi
  - .4 Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/ peta informasi pemukiman
  - .5 Standarisasi dan spesifikasi rumah transmigran, fasilitas umum / sosial dan jaringan transportasi
  - .6 Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya , identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah
  - .7 Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi
  - .8 Tata ruang pemukiman transmigrasi
    - .1 Rancangan dan Pemanfaatan areal tanah
    - .2 Rancangan Kapling TSM
    - .3 Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum
    - .4 Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah
    - .5 Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah
    - .6 Pengukuran batas unit pemukiman
    - .7 Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah
  - .9 Sarana Pemukiman Transmigrasi
    - .1 Pembinaan dan Pengadiln, penyiapan bangunan rumah transmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum
    - .2 Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih
    - .3 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi
    - .4 Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana
    - .5 Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan
- .3 Pengerahan, pemindahan dan penempatan
  - .1 Pengkajian dan pengembangan metode pengarahn dan penempatan
  - .2 Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengarahn dan penempatan
  - .3 Pengerahan
    - .1 Pendaftaran dan seleksi calon transmigran
    - .2 Berkas Persyaratan dan administrasi calon Transmigran
    - .3 Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan
  - .4 Pemberangkatan Transmigran
    - .1 Pengangkutan Transmigran melalui laut, udara, dan darat
    - .2 Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan
    - .3 Pelaksanaan Pengurusan Pemberangkatan
    - .4 Pengawalan Perjalanan Transmigran
    - .5 Pengaturan Rute Pemberangkatan
    - .6 Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan
  - .5 Penempatan Transmigran
    - .1 Kesiapan lokasi dan daya tampung



- .2 Pendapatan Transmigran di lokasi yang masih dibina
- .3 Data Transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT
- .4 Pemantauan penempatan Transmigrasi pengganti
- .4 Penampungan Transmigrasi (Transito), dan Pelatihan transmigran

- .1 Pelatihan Transmigran

- .1 Program Pengajaran dan metode pelatihan
- .2 Penyusunan silabus dan modul pelatihan
- .3 Penyusunan calon peserta / pelatih

- .2 Penampungan Transmigran di transito

- .1 Pelayanan kesehatan bagi Transmigran
- .2 Pelayanan makanan bagi Transmigran
- .3 Pelayanan pembekalan/ peralatan bagi Transmigran

- .5 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi

- .1 Identifikasi dan penjajagan pembinaan

- .1 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian
- .2 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan
- .3 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan

- .2 Pembinaan Pendidikan

- .1 Penyediaan/ penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan
- .2 Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status

- .3 Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat

- .4 Pembinaan Kesehatan

- .1 Penyediaan sarana kesehatan dan KB
- .2 Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
- .3 Pendistribusian bantuan Pangan

- .5 Pembinaan rokhani

- .1 Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama
- .2 Bimbingan adaptasi masyarakat
- .3 Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial

- .6 Pelayanan pos di daerah Transmigrasi

- .7 Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan

- .8 Penilaian Transmigran Teladan

- .9 Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha

476 Keluarga Berencana

- .1 Alat Kontrasepsi
- .2 Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri
- .3 Penyuluh Lapangan KB (PLKB)
- .4 Pos KB Desa
- .5 Akseptor KB

477 Proyeksi dan Penyerasian Kebuijakan. Kependudukan

- .1 Indikator Kependudukan

- .1 Perumusan Penetapan dan Pengembangan Indikator Kependudukan
- .2 Pemanfaatan Indikator Kependudukan
- .3 Sosialisasi Indikator Kependudukan

- .2 Proyeksi Penduduk

- .1 Penyusunan dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan



- .2 Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan
- .3 Analisis Dampak Kependudukan
  - .1 Penyusunan dan Pengembangan Analisis Dampak Kependudukan
  - .2 Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan
- .4 Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah
  - .1 Lembaga Internasional
  - .2 Lembaga Masyarakat dan Nirlaba
  - .3 Lembaga Usaha Swasta
- .5 Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah
  - .1 Lembaga Pemerintah
  - .2 Pemerintah Provinsi dan Kota
  - .3 Pemerintah Kabupaten
- 476 Monitoring
- 477 Evaluasi
- 478 Dokumentasi
  
- 480 MEDIA MASSA
  - .1 Kebijakan dan Program Pemerintah dalam bidang media massa
- 481 Media Cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
  - .1 Surat Kabar
  - .2 Majalah
  - .3 Buletin
  - .4 Jurnal
  - .5 Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik
    - .1 Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok
    - .2 Perekonomian dan Perbankan
    - .3 Bidang Lainnya
  - .6 Layanan Informasi / Leaflet
  - .7 Masukan Analisis Gubernur
- 482 Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
  - .1 Radio
  - .2 Televisi
  - .3 Film Dokumenter
  - .4 Pengawasan Lembaga Penyiaran
  - .5 Kelompok pemantau Isi Siaran
  - .6 Pengkajian Isi Siaran
  - .7 SDM Penyiaran
- 483 Periklanan
  - .1 Ketentuan Pemasangan Reklame
  - .2 Pameran
- 484 Kewartawanan / Jurnalistik
  - .1 Pembentukan Organisasi Profesi
  - .2 Kasus-kasus Kewartawanan
  - .3 Penyalahgunaan Profesi
  - .4 Bantuan kepada / dari organisasi Profesi Wartawan
  - .5 Musyawarah Wartawan Indonesia
  - .6 Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan
  - .7 Temu Pers/Konferensi Pers
  - .8 Pers Tour
  - .9 Kunjungan Wartawan Asing



- 485 Penyuluhan Masyarakat
  - .1 Publikasi
  - .2 Pendirian Information Center
- 486 Pembinaan Bidang Infokom
  - .1 Training Fotografi
  - .2 Training Berita Jurnalistik
  - .3 Bintek Infokom
  - .4 Rakorda Infokom
  - .5 Rakor Pengendalian Kegiatan
  - .6 Pengelolaan Website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 487 Hubungan Antar Lembaga
  - .1 Non Pemerintah
    - .1 Wahana Komunikasi Masyarakat
    - .2 Lembaga Komunikasi Masyarakat
  - .2 Lembaga Pemerintah
    - .1 Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan
    - .2 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
  - .3 Luar Negeri
    - .1 Promosi Luar Negeri
    - .2 Kunjungan Wartawan Asing
- 488 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi
- 489 Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur
  - .1 Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif
  - .2 Dialog Interaktif
  - .3 Rubrik
  - .4 Materi/pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif
  - .5 Pembuatan Kolom Khusus Hasil-hasil Pembangunan
- 490 Grafika
- 491 Penerangan
  - .1 Pameran Non Komersil
- 492 Operation Room
- 493 Hubungan Masyarakat
  
- 500 PEREKONOMIAN
  - .1 Dewan Stabilisasi
- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang
- 503 Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai bidang, klasifikasi pada masalahnya
  
- 510 PERDAGANGAN
  - .1 Promosi perdagangan
    - .1 Pekan raya
    - .2 Iklan
    - .3 Pameran
    - .4 Event-event
    - .5 Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
  - .2 Pelelangan, distribusi
    - .1 Pemasaran Sembako



- .2 Pemasaran hasil industri
- .3 Penentuan harga pokok
- .3 Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
  - .1 Rencana dan Program kerja
  - .2 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
  - .3 Pelaksanaan Teknis
  - .4 Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha
  - .5 Evaluasi dan Pelaporan
- .4 Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll)
  - .1 Penerbitan SIUP
  - .2 Perpanjangan
  - .3 Ijin prinsip
  - .4 Rekomendasi
- .5 Perdagangan antar Pulau
  - .1 Kerjasama bahan baku
  - .2 Industri pemasaran
  - .3 Kontrak
- .6 T e r a
  - .1 Tera dan Tera Ulang
  - .2 Takaran
  - .3 Timbangan dan anak timbangan
  - .4 Kalibrasi
  - .5 Cap tanda tera
  - .6 Biaya tera
- .7 Bantuan peralatan
  - .1 Proposal
  - .2 Surat perjanjian/kontrak
  - .3 Serah terima
- .8 Perijinan/Rekomendasi Tanda Pabrik
- .9 Kemetrolagian
  - .1 Standart Tingkat Tiga
  - .2 Standart Kerja Satuan Ukuran
  - .3 Ukuran Metrologi
    - .1 Peralatan
    - .2 Laboratorium Metrologi Legal
    - .3 Tanki Ukur Mobil
    - .4 Meter Taxi
    - .5 KWH Meter termasuk didalamnya listrik dan PDAM
    - .6 S P B U
- 511 Pemasaran
  - .1 Sembilan bahan pokok diantaranya beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dll
  - .2 P a s a r
  - .3 Pertokoan, kaki lima, kios
  - .4 Pusat perbelanjaan
- 512 Ekspor
  - .1 Ekspor Hasil Industri
  - .2 Ijin Ekspor
  - .3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
  - .4 Managemen Perdagangan Internasional
  - .5 Eksport Hasil Industri
    - .5 .1 Kebijakan



- .5 .2 Pemasaran
- .6 Pemberitahuan Eksport Barang
- .7 Pengawasan Mutu Barang
- .8 Eksportir Terdaftar
- .9 Evaluasi dan pelaporan
- 513 Impor
  - .1 Ijin Impor
    - .1 .1 Pemberian Ijin
    - .1 .2 Pengendalian Ijin
  - .2 Standart Mata Dagang Import
  - .3 Management Perdagangan Internasional
  - .4 Kegiatan Import
    - .4 .1 Pembinaan Import
    - .4 .2 Pengendalian Import
    - .4 .3 Pemantauan Import
  - .5 Faktor-faktor Pendukung
  - .6 Pengawasan Mutu Barang Import
  - .7 Penyaluran Kegiatan Import
    - .7 .1 Bahan Konsumsi
    - .7 .2 Bahan Baku
    - .7 .3 Bahan Penolong
  - .8 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import
- 514 Perdagangan antar Pulau
  - .1 Kerjasama Bahan Baku
  - .2 Industri Pemasaran
  - .3 Kontrak
- 515 Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negeri
  - .1 Promosi dan Informasi
  - .2 Pameran
  - .3 Kerjasama
- 516 Pergudangan, termasuk tangki penyimpanan minyak goreng
  - .1 Peti Kemas
  - .2 Tangki Penyimpanan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 Koperasi (Untuk BUUD, KUD)
  - .1 Bina Usaha Koperasi
    - .1 .1 Koperasi Pertanian
    - .1 .2 Koperasi Non Pertanian
    - .1 .3 Permodalan Koperasi
      - .1 .3 .1 Penumpukan Modal
      - .1 .3 .2 Pemanfaatan Modal
      - .1 .3 .3 Perbankan dan Asuransi
      - .1 .3 .4 Permodalan Luar Koperasi
      - .1 .3 .5 Kredit Program Umum
      - .1 .3 .6 Kredit Program Khusus
    - .1 .4 Distribusi dan Jasa Koperasi
      - .1 .4 .1 Distribusi Bahan Pokok
      - .1 .4 .2 Distribusi Aneka Bahan
      - .1 .4 .3 Distribusi Kerjasama Niaga
      - .1 .4 .4 Jasa Angkutan
      - .1 .4 .5 Jasa Perumahan
      - .1 .4 .6 Aneka Jasa



- .1 .5 Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
- .2 Bina Lembaga Koperasi
  - .2 .1 Organisasi Koperasi
    - .2 .1 .1 Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
    - .2 .1 .2. Pemberian Badan Hukum Koperasi
    - .2 .1 .3 Penyelesaian Pembubaran Koperasi
    - .2 .1 .4 Keragaan Koperasi
    - .2 .1 .5 Pengakuan Koperasi Sekolah
    - .2 .1 .6 Amalgamasi
    - .2 .1 .7 Tertib Organisasi Koperasi
    - .2 .1 .8 Penyelesaian Penyelesaian/Persengketaan
    - .2 .1 .9 Bimbingan Kesadaran Hukum
  - .2 .2 Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
    - .2 .2 .1 Rapat Anggota Tahunan Koperasi
    - .2 .2 .2 Pengurus dan Bahan Pemeriksa
    - .2 .2 .3 Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
    - .2 .2 .4 Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)
  - .2 .3 Bina Tata Laksana Koperasi
    - .2 .3 .1 Klasifikasi Koperasi Pedesaan
    - .2 .3 .2 Klasifikasi Koperasi Perkotaan
    - .2 .3 .3 Klasifikasi Koperasi Sekunder
  - .2 .4 Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
    - .2 .4 .1 Administrasi Koperasi Pedesaan
    - .2 .4 .2 Administrasi Koperasi Perkotaan
    - .2 .4 .3 Karyawan/Manager Koperasi
    - .2 .4 .4 Sumber Daya Manusia
    - .2 .4 .5 Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST)
    - .2 .4 .6 Penyaluran Alat Sekolah
    - .2 .4 .7 Bantuan Pemda Kepada Koperasi/KUD
  - .2 .5 Akuntansi
    - .2 .5 .1 Akuntansi Koperasi Pedesaan
    - .2 .5 .2 Akuntansi Koperasi Perkotaan
    - .2 .5 .3 Akuntansi Koperasi Sekunder
  - .2 .6 Pengawasan Koperasi
    - .2 .6 .1 Pengawasan Koperasi Primer
    - .2 .6 .2 Pengawasan Koperasi Sekunder
    - .2 .6 .3 Koperasi Jasa Audit
    - .2 .6 .4 Kerjasama Kantor Akuntan
  - .2 .7 Penyuluhan Koperasi
    - .2 .7 .1 Pembinaan Kader Koperasi
    - .2 .7 .2 Masyarakat Umum
    - .2 .7 .3 Forum Komunikasi
    - .2 .7 .4 Kelompok Tani
    - .2 .7 .5 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
    - .2 .7 .6 Penilaian Tingkat Nasional
- .3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
  - .3 .1 Pembinaan Usaha
    - .3 .1 .1 Pembinaan Usaha Mikro
    - .3 .1 .2 Pembinaan Usaha Kecil
    - .3 .1 .3 Pembinaan Usaha Menengah
  - .3 .2 Pengawasan Usaha

- .3 .2 .1 Pengawasan Usaha Mikro
- .3 .2 .2 Pengawasan Usaha Kecil
- .3 .2 .3 Pengawasan Usaha Menengah



520 PERTANIAN

521 Tanaman Pangan

- .1 Rencana dan Program
  - .1 .1 Bimas/Inmas Termasuk Kredit
  - .1 .2 Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
  - .1 .3 Penyuluhan
- .2 Produksi
  - .2 .1 Padi
  - .2 .2 Palawija
  - .2 .3 Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias)
  - .2 .4 Panen Gagal (Puso)
  - .2 .5 Jagung
  - .2 .6 Ketela Pohon/Ubi-ubian
  - .2 .7 Pembudidayaan Rumput Laut
- .3 Sarana Usaha Pertanian
  - .3 .1 Peralatan
  - .3 .2 Meliputi Traktor dan sebagainya
  - .3 .3 Pembenihan dan pembibitan
  - .3 .4 Pupuk
  - .3 .5 Irigasi Pertanian
  - .3 .6 Rehabilitasi Lahan Pertanian
- .4 Perlindungan Tanaman
  - .4 .1 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan
    - .4 .1 .1 Penyakit Tanaman Pangan
    - .4 .1 .2 Hama tanaman pangan
  - .4 .2 Pemberantas
    - .4 .2 .1 Pestisida
    - .4 .2 .2 Agensia Pengendalian Hayati
  - .4 .3 Tanah Pertanian Pangan
    - .4 .3 .1 Persawahan
    - .4 .3 .2 Perladangan
    - .4 .3 .3 Kebun
    - .4 .3 .4 Rumpon Ikan Laut
- .5 Pengusaha, Petani
- .6 Lahan Kritis
- .7 Pemasaran dan Promosi Pertanian
- .8 Pengembangan Sumber Daya Pertanian
- .9 Bina Usaha
  - .1 Pasca Panen
  - .2 Pemasaran Hasil

522 Kehutanan

- .1 Perencanaan Hutan
  - .1 .1 Survey
    - .1 .1 .1 Survey PPA
    - .1 .1 .2 Survey Areal
    - .1 .1 .3 Survey Pembinaan Hutan
    - .1 .1 .4 Survey Potensi Hutan





- .1 .2 Pendataan / Inventarisasi Areal Hutan
  - .1 .2 .1 Data Areal Tata Guna Hutan
  - .1 .2 .2 Data areal konservasi
- .2 Tata Guna hutan
  - .2 .1 Tata Ruang Kawasan
    - .2 .1 .1 Pengurusan Kawasan Hutan
    - .2 .1 .2 Penafsiran Hutan
    - .2 .1 .3 Mutasi Hutan
  - .2 .2 Tata Hutan
    - .2 .2 .1 Tata Hutan Sementara
    - .2 .2 .2 Tata Hutan Tetap
    - .2 .2 .3 Pembukaan Hutan
  - .2 .3 Pengukuran dan pemetaan
- .3 Pengusahaan Hutan
  - .3 .1 Data Areal HPH
    - .3 .1 .1 SK HPH
    - .3 .1 .2 Kerja sama
    - .3 .1 .3 Pembatalan/Penolakan
  - .3 .2 Modal dan Peralatan
    - .3 .2 .1 Inventarisasi Logging
    - .3 .2 .2 Inventarisasi Industri
    - .3 .2 .3 Peralatan
    - .3 .2 .4 Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
    - .3 .2 .5 Pemegang Saham
    - .3 .2 .6 Neraca Perusahaan
  - .3 .3 Rencana Kerja
    - .3 .3 .1 KHPH
    - .3 .3 .2 RKPH
  - .3 .4 Perpanjangan LPH
  - .3 .5 Produksi
    - .3 .5 .1 Target Produksi
    - .3 .5 .2 Produksi Kayu
    - .3 .5 .3 Produksi Non Kayu
  - .3 .6 Industri
    - .3 .6 .1 Industri Kayu HPH
    - .3 .6 .2 Industri Kayu Non HPH
    - .3 .6 .3 Industri Non Kayu
  - .3 .7 Pembinaan HPH
    - .3 .7 .1 Pelanggaran dan Sanksi
  - .3 .8 Pembangunan Hutan Tanaman Industri
    - .3 .8 .1 Hutan Tanaman Industri Pulp
    - .3 .8 .2 HTI Pertukaran
  - .3 .9 Iuran Hutan
- .4 Sarana Usaha
  - .4 .1 Standarisasi
    - .4 .1 .1 Kayu
    - .4 .1 .2 Non Kayu
  - .4 .2 Pengujian Hasil Hutan
  - .4 .3 Pengembangan
    - .4 .3 .1 Pengembangan Perusahaan
    - .4 .3 .2 Pengembangan Pemasaran
  - .4 .4 Pemasaran Hasil Hutan

- .4 .5 SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), Angkutan Hasil Hutan
  - .4 .5 .1 Sarana dan Prasarana
  - .4 .5 .2 Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
- .4 .6 Tata Usaha Hasil Hutan
- .4 .7 PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)
- .5 Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
  - .5 .1 Konservasi Jenis
    - .5 .1 .1 Satwa yang dilindungi
    - .5 .1 .2 Satwa yang tidak dilindungi
    - .5 .1 .3 Lembaga Konservasi Satwa
    - .5 .1 .4 Lembaga Konservasi Tumbuhan
  - .5 .2 Kawasan Konservasi
    - .5 .2 .1 Cagar Alam (termasuk laut)
    - .5 .2 .2 Suaka Margasatwa
    - .5 .2 .3 Taman Wisata (termasuk laut)
    - .5 .2 .4 Taman Nasional
    - .5 .2 .5 Taman Hutan Raya/ Kebun Raya
    - .5 .2 .6 Taman Baru
    - .5 .2 .7 Hutan Lindung
  - .5 .3 Pengkajian Lingkungan
    - .5 .3 .1 Amdal UKL, UPL, Di Dalam Kawasan
    - .5 .3 .2 Amdal UKL, UPL, Di Luar Kawasan
  - .5 .4 Bina Cinta Alam
    - .5 .4 .1 Kelompok Pecinta Alam
    - .5 .4 .2 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
    - .5 .4 .3 Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Alam
    - .5 .4 .4 LSM Lingkungan
  - .5 .5 Pengamanan Hutan
    - .5 .5 .1 Jaga Wana
    - .5 .5 .2 PPNS
    - .5 .5 .3 Gangguan Keamanan Hutan
    - .5 .5 .4 Bencana Alam
    - .5 .5 .5 Kebakaran Hutan
    - .5 .5 .6 Sengketa Hutan
    - .5 .5 .7 Hama dan Penyakit
    - .5 .5 .8 Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
    - .5 .5 .9 Alat dan Mesin Kehutanan
- .6 Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
  - .6 .1 Pembenihan
    - .6 .1 .1 Tegakan Benih
    - .6 .1 .2 Pengadaan Benih
    - .6 .1 .3 Pengujian dan Penyimpangan Benih
    - .6 .1 .4 Lalu Lintas Angkutan Benih
    - .6 .1 .5 Pembibitan
    - .6 .1 .6 Pengada dan Pengedar Bibit Bersertifikat
    - .6 .1 .7 Pengada dan Pengedar Bibit Tidak Bersertifikat
  - .6 .2 Tanaman Reboisasi
    - .6 .2 .1 Lahan Kritis
    - .6 .2 .2 Reboisasi Lahan HPH
    - .6 .2 .3 Rehabilitasi Tanah Hutan
    - .6 .2 .4 Konservasi Tanah dan Air





- .6 .2 .5 Pengendalian Perladangan
- .6 .2 .6 Penghijauan
- .6 .2 .7 Aneka Usaha Kehutanan
- .6 .3 Perhutanan Sosial
  - .6 .3 .1 Sutera Alam
  - .6 .3 .2 Minyak Kayu Putih
  - .6 .3 .3 Perlebahan
- .7 Hutan Produksi
  - .7 .1 Hutan Produksi Terbatas
  - .7 .2 Hutan Produksi yang dapat Dikonservasi
- .8 Kawasan Lindung

## 523 Perikanan dan Kelautan

- .1 Rencana, Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan bidang Perikanan dan Kelautan
  - .1 .1 Penyuluhan
  - .1 .2 Teknologi
- .2 Produksi Perikanan
  - .2 .1 Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
  - .2 .2 Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC
  - .2 .3 Sertifikasi Kesehatan Ikan
- .3 Usaha Perikanan
  - .3 .1 Pelatihan Nelayan
  - .3 .2 Pembinaan wanita nelayan
  - .3 .3 Fasilitas perijinan : SIUP, SIPI, SKP
  - .3 .4 Perbenihan
- .4 Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
  - .4 .1 Ekspor Hasil Perikanan
  - .4 .2 Impor Hasil Perikanan
  - .4 .3 Pemasaran Dalam Negeri
  - .4 .4 Pengusaha perikanan
- .5 Sarana Perikanan
  - .5 .1 Pelabuhan Perikanan Pantai
  - .5 .2 TPI/PPI
  - .5 .3 Kesyahbadaran
  - .5 .4 Peralatan penangkapan : Kapal, perahu, jaring, pump dsb
- .6 Pengendalian hama dan penyakit
  - .6 .1 Penyakit Ikan
  - .6 .2 Hama Ikan
  - .6 .3 Obat-obatan termasuk sertifikasinya
- .7 Konservasi dan Suaka Laut
  - .7 .1 Transplatasi bibit Karang
  - .7 .2 Terumbu Karang
  - .7 .3 Mangrove
  - .7 .4 Garam
  - .7 .5 Harta Karun di dalam laut
  - .7 .6 Pembinaan / Pendidikan masyarakat pesisir

## 524 Peternakan dan Kesehatan Hewan

- .1 Produksi
  - .1 .1 Perbibitan
  - .1 .2 Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
  - .1 .3 Budidaya



- .1 .4 Susu Ternak Rakyat
- .1 .5 Telur
- .1 .6 Daging
- .1 .7 Kulit
- .2 Usaha Peternakan
  - .2 .1 Pelayanan Usaha
  - .2 .2 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
  - .2 .3 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan
- .3 Kesehatan Hewan
  - .3 .1 Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
  - .3 .2 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
  - .3 .3 Obat-obat Hewan
  - .3 .4 Pelayanan Kesehatan Hewan
- .4 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
  - .4 .1 Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
  - .4 .2 Hygieni dan Sanitasi
  - .4 .3 Produk Hewani
- .5 Laboratorium Kesehatan Hewan
  - .5 .1 Pengujian Mutu Asal Hewan
  - .5 .2 Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan
- .6 Inseminasi Buatan
  - .6 .1 Produksi Distribusi dan Pemasaran
  - .6 .2 Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi
- .7 Pembibitan dan Budi Daya Ternak
  - .7 .1 Ternak Non Ruminansia
  - .7 .2 Ternak Ruminansia
- .8 Sarana Usaha Ternak
  - .8 .1 Pembibitan
  - .8 .2 Kandang Ternak
- .9 Kesehatan Hewan
  - .9 .1 Penyakit Hewan
  - .9 .2 Pos Kesehatan Hewan
  - .9 .3 Test Pulumur
  - .9 .4 Karantina
  - .9 .5 Pemberantasan Penyakit Hewan Termasuk upaya pencegahannya
- .10 Makanan Ternak
- .11 Tempat Pemotongan Hewan
- .12 Data Peternakan

## 525 Perkebunan

- .1 Program dan Pelaporan
  - .1 .1 Pelaporan
  - .1 .2 Monitoring
  - .1 .3 Statistik Perkebunan
- .2 Produksi
  - .2 .1 Karet
  - .2 .2 T e h
  - .2 .3 Tembakau
  - .2 .4 T e b u
  - .2 .5 Cengkeh
  - .2 .6 Kelapa/ Kopra / Kelapa Sawit



- .2 .7 Kopi
- .2 .8 Kakao
- .2 .9 Jenis Tanaman yang Lain
- .3 Usaha Perkebunan
  - .3 .1 Benih
  - .3 .2 Pembibitan
  - .3 .3 Kelompok Tani
  - .3 .4 Kemitraan
  - .3 .5 Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan
  - .3 .6 Pemasaran Hasil Perkebunan
- .4 Perlindungan Tanaman
  - .4 .1 Hama
  - .4 .2 Pestisida
  - .4 .3 Agensi Pengendalian Hayati
- .5 Alat dan Mesin Perkebunan
  - .5 .1 Power Sprayer
  - .5 .2 Hand Sprayer
  - .5 .3 Polibag
  - .5 .4 Alat Laboratorium Perkebunan
  - .5 .5 Reagen
  - .5 .6 Sarana / Alat Produksi Perkebunan
- .6 Pengolahan lahan
  - .6 .1 Terasering
- .7 Pemasyarakatan
  - .7 .1 Penyuluhan
  - .7 .2 Sosialisasi
  - .7 .3 Informasi

## 526 Ketahanan Pangan

- .1 Program Bimbingan Massal
- .2 Pengembangan Sarana Sumber Daya
  - .2 .1 Pembinaan Teknologi
  - .2 .2 Sarana Produksi dan Permodalan
  - .2 .3 Kelembagaan
- .3 Agribisnis
  - .3 .1 Mutu Hasil
  - .3 .2 Pengelola Hasil Pangan
  - .3 .3 Pemasaran Hasil
  - .3 .4 Kementrian
- .4 Distribusi Pangan
  - .4 .1 Sistem dan Pola Distribusi
  - .4 .2 Sarana dan Prasarana Distribusi
  - .4 .3 Pengadaan dan Cadangan Pangan
- .5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
  - .5 .1 Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
  - .5 .2 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
  - .5 .3 Sistem Informasi Pangan

## 527 Penyuluhan

- .1 Sumber Daya Manusia
  - .1 .1 Penyuluh
  - .1 .2 Pelaku Utama Pelaku Usaha
  - .1 .3 Stake holder



- .2 Kelembagaan
  - .2 .1 Struktual
  - .2 .2 Non Struktual
  - .2 .3 Pelaku Utama Pelaku Usaha
  - .2 .4 Lembaga Profesi
- .3 Penyelenggaraan Penyuluhan
  - .3 .1 Program / Metode
  - .3 .2 Promosi / pameran / kampanye
  - .3 .3 Penghargaan / Lomba
  - .3 .4 Materi
  
- 530 PERINDUSTRIAN
  - .1 Undang-undang Gangguan
- 531 Industri Logam
- 532 Industri Mesin / Elektronik
- 533 Industri Kimia / Farmasi
- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri makanan / Minuman
- 536 Aneka Industri / Perusahaan
  - .1 Home Industri
- 537 Aneka Kerajinan
  - .1 Kerajinan Rakyat
- 538 Usaha Negara
  - .1 Perjan
  - .2 Perum
  - .3 Persero
- 539 Perusahaan Daerah
  
- 540 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- 541 Minyak dan Gas Bumi
  - .1 Pengusahaan
    - .1 .1 Perijinan
    - .1 .2 Rekomendasi
    - .1 .3 Kontrak Karya
    - .1 .4 Pengolahan
  - .2 Penyaluran
  - .3 Tangki, Pompa, Tanker
- 542 Energi
  - 1 Energi Alternatif
    - .1 .1 Gas Rawa
    - .1 .2 Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
    - .1 .3 Biogas
    - .1 .4 Energi baru terbarukan
    - .1 .5 Perijinan
    - .1 .6 Rekomendasi
    - .1 .7 Pembinaan dan Pengawasan
  - .2 Konservasi Energi
  - .3 Pemetaan Energi
  - .4 Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)
- 543 Pertambangan, mineral dan batubara
  - .1 Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)
    - .1 .1 WIUP Batuan
    - .1 .2 WIUP Bukan Logam



- .1 .3 WIUP Logam
- .1 .4 WIUP Batubara
- .2 Rekomendasi Teknis
- .3 Perijinan
  - .3 .1 IUP Eksplorasi
  - .3 .2 IUP Operasi Produksi
  - .3 .3 IUP Operasi Produksi Khusus
  - .3 .4 Ijin Usaha Jasa Pertambangan
  - .3 .5 Pencabutan Ijin
- .4 Pembinaan
- .5 Pengawasan
  - .5 .1 Pengawasan Usaha Pertambangan
  - .5 .2 Penerbitan Kegiatan Pertambangan
- .6 Pasca Tambang
  - .6 .1 Reklamasi
  - .6 .2 Penutupan
- 544 Air Tanah
  - .1 Cekungan Air Tanah (CAT)
    - .1 .1 Pemetaan CAT
    - .1 .2 Imbuhan CAT
    - .1 .3 Lepasana CAT
    - .1 .4 Konservasi
    - .1 .5 Pengendalian Daya Rusak
  - .2 Rekomendasi Teknis
  - .3 Sumur Artesis
  - .4 Sumur Bor
  - .5 Sumur Gali (Pasak)
  - .6 Pengusaha Pengebor (APATINDO)
  - .7 Sumur Pantau
  - .8 Harga Dasar Air / Nilai Perolehan Air
  - .9 Hidrologi
- 545 Geologi
  - .1 Pemetaan
  - .2 Mitigasi Bencana Geologi
  - .3 Vulkanologi
    - .3 .1 Pengawasan Vulkanologi
    - .3 .2 Panas Bumi
  - .4 Hidrogeologi
  - .5 Gerakan Tanah (longsoran, amblesan)
  - .6 Pengawasan, pengendalian
- 546 Hidrologi
- 547 kesamudraan
- 548 Penghematan Energi
- 550 PERHUBUNGAN
- 551 Perhubungan Darat
  - .1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
    - .1 .1 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
    - .1 .2 Uji Kelayakan kendaraan Bermotor (Keur)
    - .1 .3 Kecelakaan Lalu Lintas
  - .2 Angkutan Jalan Raya
    - .2 .1 Perizinan



- .2 .2 Terminal
- .2 .3 Alat Angkutan
- .2 .4 Jembatan Timbang / Lebih Muatan
- .2 .5 Uji Mutu
- .3 Angkutan Sungai
  - .3 .1 Keselamatan, Rambu-rambu
  - .3 .2 Lalu Lintas
  - .3 .3 Alur dan Kolam Pelabuhan
  - .3 .4 Trayek
  - .3 .5 Sarana / Kapal
  - .3 .6 Pelabuhan
  - .3 .7 Terminal
  - .3 .8 Kecelakaan
  - .3 .9 Perizinan
- .4 Angkutan Danau
  - .4 .1 Keselamatan, Rambu-rambu
  - .4 .2 Lalu Lintas
  - .4 .3 Alur dan Kolam Pelabuhan
  - .4 .4 Trayek
  - .4 .5 Sarana / Kapal
  - .4 .6 Pelabuhan
  - .4 .7 Terminal
  - .4 .8 Kecelakaan
  - .4 .9 Perizinan
- .5 Perkereta-Apian
  - .5 .1 Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie
  - .5 .2 Prasarana (Jalan/Jembatan)
  - .5 .3 Trayek
  - .5 .4 Angkutan Penumpang
  - .5 .5 Angkutan Barang
  - .5 .6 Keselamatan
  - .5 .7 Kecelakaan
  - .5 .8 Perawatan / Perbaikan
  - .5 .9 Perizinan
- 552 Perhubungan Laut
  - .1 Lalu Lintas Angkutan Laut
    - .1 .1 Pelayaran Dalam Negeri
    - .1 .2 Pelayaran Luar Negeri
    - .1 .3 Pelayaran Haji
    - .1 .4 Pelayaran Charter / Wisata Turis
    - .1 .5 Pelayaran Khusus
    - .1 .6 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
  - .2 Perkapalan - Alat Angkutan
    - .2 .1 Kapal Penumpang
    - .2 .2 Kapal Barang
    - .2 .3 Kapal Perang / Patroli / Negara
    - .2 .4 Kapal Tanker
    - .2 .5 Ponton, Tongkong
    - .2 .6 Kapal Layar
    - .2 .7 Kapal Layar Motor
    - .2 .8 Kapal Kontainer
  - .3 Pelabuhan





- .3 .1 Tanah / Lokasi
- .3 .2 Alur Layar
- .3 .3 Dermaga
- .3 .4 Terminal Penumpang
- .3 .5 Terminal Kontainer
- .3 .6 Bantuan / Gedung / Gudang
- .3 .7 Perlengkapan Tambat Labuh
- .3 .8 Lapangan Penumpukan
- .3 .9 Pelabuhan Khusus / Dermaga Khusus
- .4 Pengerukan / Perawatan
  - .4 .1 Alur Pelayaran
  - .4 .2 Kolam Pelabuhan
  - .4 .3 Reklamasi Pantai
  - .4 .4 Dumping Area
  - .4 .5 Pekerjaan Bawah Air (Salvage)
- .5 Penjagaan Pantai
  - .5 .1 Patroli Bandar
  - .5 .2 Patroli Perairan
  - .5 .3 Penjagaan pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)
- .6 Angkutan Barang
  - .6 .1 P o s
  - .6 .2 Minyak
  - .6 .3 L o g
  - .6 .4 Ternak
  - .6 .5 Sembilan Bahan Pokok
  - .6 .6 Peti Kemas / EMKL
  - .6 .7 Muatan Umum
  - .6 .8 Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri
  - .6 .9 Bongkar Muatan
- .7 Keselamatan
  - .7 .1 Rambu-rambu / Mercu suar
  - .7 .2 Kelaikan Kapal / Pembangunan Kapal
  - .7 .3 Fasilitas Keselamatan
  - .7 .4 Telekomunikasi Pelayaran
  - .7 .5 Sertifikasi Kesempurnaan Kapal
  - .7 .6 Sertifikasi Awak Kapal
- .8 Kecelakaan, Gangguan
  - .8 .1 Kecelakaan Penumpang / Kapal
  - .8 .2 Kecelakaan Barang
  - .8 .3 Gangguan sarana / prasarana
  - .8 .4 Pembajakan/ penyelundupan
  - .8 .5 Pencemaran
- .9 Perijinan
  - .9 .1 Ijin Berlayar
  - 9 .2 Ijin Pekerjaan Bawah Air
  - .9 .3 Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal
  - .9 .4 Ijin Pembukaan Kantor Cabang
  - .9 .5 Ijin Usaha Angkutan Laut
  - .9 .6 Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut
  - .9 .7 Ijin Pelayaran Jasa Kepelabuhan
  - .9 .8 Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus



- .9 .9 Ijin Pembangunan Dermaga Khusus
- 553 Perhubungan Udara
  - .1 Lalu Lintas Angkutan Udara
    - .1 .1 Penerbangan Domestik
    - .1 .2 Penerbangan Luar Negeri
    - .1 .3 Penerbangan Haji
    - .1 .4 Penerbangan Charter / Non Reguler
    - .1 .5 Penerbangan Khusus / Jembatan Udara
  - .2 Pelabuhan Udara
    - .2 .1 Tanah / Lokasi
    - .2 .2 Landasan
    - .2 .3 Apron
    - .2 .4 Terminal Penumpang
    - .2 .5 Terminal Cargo
    - .2 .6 Bangunan / Gedung
    - .2 .7 Perlengkapan
    - .2 .8 Parkir Kendaraan
  - .3 Alat Angkutan
    - .3 .1 Pesawat Udara
    - .3 .2 Helikopter
  - .4 Angkutan Barang
    - .4 .1 Pos
    - .4 .2 Muatan Dalam Negeri
    - .4 .3 Muatan Luar Negeri
    - .4 .4 EMPU
  - .5 Sertifikasi Kelaikan
    - .5 .1 Kelaikan Pesawat Udara
    - .5 .2 Kelaikan Peralatan Penunjang
    - .5 .3 Kelaikan Personil / Awak Kapal
  - .6 Keselamatan
    - .6 .1 Rambu-rambu
    - .6 .2 Perakitan / Kalibrasi
    - .6 .3 Fasilitas keselamatan
    - .6 .4 Telekomunikasi Penerbangan
  - .7 Kecelakaan / Gangguan
    - .7 .1 Kecelakaan Penumpang
    - .7 .2 Kecelakaan Barang
    - .7 .3 Gangguan sarana / prasarana
    - .7 .4 Pembajakan
    - .7 .5 Pencemaran
  - .8 Umum
    - .8 .1 Asuransi
    - .8 .2 Asosiasi
    - .8 .3 SATPAM
    - .8 .4 Rally Udara / Lomba
  - .9 Perizinan
    - .9 .1 Izin Terbang / Flight Approval
    - .9 .2 Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan / EMPU
    - .9 .3 Pembukaan Kantor Cabang
    - .9 .4 Rekomendasi Ketinggian Bangunan
    - .9 .5 Pembangunan Bandar Udara Khusus



- .1 Pembinaan
  - .1 .1 Kebutuhan Fasilitas
  - .1 .2 Rehabilitasi / Perawatan
  - .1 .3 Bina Usaha / Pengawasan / Penawaran
  - .1 .4 Standarisasi Perangkat
  - .1 .5 Tanah / Bangunan
  - .1 .6 Filateli
  - .1 .7 Asosiasi
  - .1 .8 Laporan dan Evaluasi
- .2 Pelayanan
  - .2 .1 Jasa Pos
  - .2 .2 Jasa Titipan
  - .2 .3 Jasa Giro
  - .2 .4 Benda Pos / Perangko
  - .2 .5 Sampul Peringatan
  - .2 .6 Jasa Pos Elektronik
- .3 Perijinan
  - .3 .1 Rekomendasi Usaha Jasa Pos / Titipan
  - .3 .2 Pembukaan Agen / Cabang
- .4 Gangguan Sarana dan Prasarana
  - .4 .1 Kecelakaan
  - .4 .2 Sabotase
  - .4 .3 Penyelundupan
- 555 Teknologi Informasi
  - .1 Kebijakan
  - .2 Peralatan
    - .2 .1 Telepon
    - .2 .2 Internet / USO
    - .2 .3 Telegram, Telex / SBB, Faximile
    - .2 .4 Satelit, Stasiun Bumi
    - .2 .5 Radio Komunikasi
  - .3 Sistem
  - .4 Pembinaan / Penerbitan
  - .5 Perijinan
- 556 Pariwisata dan Rekreasi
  - .1 Usaha Pariwisata
    - .1 .1 Usaha Jasa Pariwisata
      - .1 .1 .1 Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
      - .1 .1 .2 Restoran dan Rumah Makan
    - .1 .2 Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata
    - .1 .3 Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
    - .1 .4 Ijin Usaha Sarana
      - .1 .4 .1 Ijin Pariwisata
      - .1 .4 .2 Ijin Usaha Pariwisata
      - .1 .4 .3 Ijin Usaha Jasa Pariwisata
      - .1 .4 .4 Ijin Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
      - .1 .4 .5 Ijin Usaha Sarana
    - .1 .5 Wisatawan
      - .1 .5 .1 Wisatawan Nusantara
      - .1 .5 .2 Wisatawan Mancanegara
    - .1 .6 Promosi dan Informasi Pariwisata
      - .1 .6 .1 Dalam Negeri



- .1 .6 .2 Luar Negeri
- .2 Perhotelan
  - .2 .1 Status Hotel
  - 2 .2 Kelas Hotel
  - .2 .3 T a r I f
- .3 Travel Service
  - .3 .1 Pramuwisata
  - .3 .2 Biro Perjalanan / Angkutan Wisata
  - .3 .3 Souvenir
  - .3 .4 Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)
- .4 Tempat Rekreasi
  - .4 .1 Obyek dan Daya Tarik Wisata
    - .4 .1 .1 Ciptaan Tuhan
    - .4 .1 .2 Hasil Karya Manusia
  - .4 .2 Rehabilitasi / Perawatan
  - .4 .3 Pengembangan Fasilitas
  - .4 .4 Tanah / Bangunan
  - .4 .5 Bina Usaha
  - .4 .6 Institusi
    - .4 .6 .1 Asosiasi
    - .4 .6 .2 Lembaga Kepariwisata

#### 557 Meteorologi

- .1 Curah Hujan
- .2 Hujan Buatan
- .3 Peneropongan Bintang
- .4 Ramalan Cuaca
- .5 Kemarau Panjang

#### 560 TENAGA KERJA

- .1 Data Permintaan TKI / TKW Dari Luar Negeri
  - .1 .1 Data Persediaan TKI / TKW Dari Daerah
- .2 Job Order TKI Ke Luar Negeri Oleh PJTKI
- .3 Rekrutmen Calon TKI / TKW
- .4 Seleksi Naker Ke Luar Negeri
  - .4 .1 Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI / TKW
  - .4 .2 Berkas Persyaratan Calon TKI / TKW
  - .4 .3 Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI / TKW
- .5 Persyaratan Naker TKI / TKW
  - .5 .1 Permohonan Rekomendasi Passport
  - .5 .2 Perjanjian Kerja TKI / TKW
  - .5 .3 Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
  - .5 .4 Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
  - .5 .5 Pelatihan TKI / TKW
- .6 Pemberangkatan Naker
  - .6 .1 Pemberangkatan Ke Luar Negeri
  - .6 .2 Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI / TKW Ke Luar Negeri
  - .6 .3 Berita Acara Serah Terima TKI / TKW
- .7 Pemulangan Naker
  - .7 .1 Kepulangan TKI / TKW Karena Kontraknya Habis
  - .7 .2 Pemulangan TKI / TKW Ilegal
  - .7 .3 TKI / TKW Terkena Kasus Pidana



- .8 Pengangguran
- 561 Upah
  - .1 Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah / Nasional
  - .2 Permohonan Penanggulangan Pelaksanaan Pembayaran Upah
  - .3 Kebutuhan Fisik Minuman
  - .4 Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur)
  - .5 Laporan Data Remittance
  - .6 Pembayaran Gaji / Upah TKI / TKW
- 562 Penempatan
  - .1 Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
    - .1 .1 Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
    - .1 .2 Penempatan Naker Non Terdidik Non Profesional
    - .1 .3 Pengembangan Kesempatan Berusaha / Perluasan Kerja
  - .2 Kesepakatan Kerja Bersama (KLB)
  - .3 Lembaga Penyalur Naker
    - .3 .1 Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal / Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN)
    - .3 .2 Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI / BKS / BKK)
    - .3 .3 Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja ( PJTKI, BKK, BKS)
- 563 Latihan Kerja
  - .1 Pendidikan Kerja
    - .1 .1 Pendidikan dan Latihan Kerja
    - .1 .2 Diklat Di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)
    - .1 .3 Diklat Di Luar Negeri (Pemagangan)
  - .2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
    - .2 .1 Tempat Pelatihan (BLK)
    - .2 .2 Instruktur / Pelatihan
    - .2 .3 Modul / Silabus dan Bahan Praktek
    - .2 .4 Kurikulum dan Metode Pengajaran
    - .2 .5 Sertifikat
  - .3 Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja
- 564 Tenaga Sukarela
  - .1 Butsi
  - .2 Padat Karya
- 565 Perselisihan Kerja
  - .1 Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
    - .1 .1 Pengaduan Perkara Pekerja / NAKER
    - .1 .2 Pemeriksaan Perkara Pekerja / NAKER
    - .1 .3 Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja / NAKER
    - .1 .4 Sidang Perkara Perselisihan Pekerja / NAKER
    - .1 .5 Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja (NAKER)
    - .1 .6 Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (PAD/P4P)
    - .1 .7 Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Keputusan KP2K (PAD/P4P)
    - .1 .8 Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (PAD/P4P)
  - .2 Pemogokan / Unjuk Rasa Tenaga Kerja
- 566 Keselamatan Kerja
  - .1 Instalasi Proteksi Kebakaran
  - .2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
  - .3 Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam Bekerja
  - .4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan



- .5 Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
- .6 Pengujian dan hasil Pemeriksaan Hyperkes
- .7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
- .8 Perlengkapan Sarana Kerja
  - .8 .1 Pemasangan dan Pemakaian Lift (Pesawat angkat/angkut)
  - .8 .2 Pemasangan dan Pemakaian Uap (ketel uap)
  - .8 .3 Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
  - .8 .4 Pemasangan dan Pemakaian Tangki tak Bertekanan
  - .8 .5 Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
- .9 Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk malam hari (Shift Malam)
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
  - .1 Pengaduan PHK Sepihak
  - .2 PHK Massal
  - .3 Bantuan Hukum bagi Pekerja yang di PHK
  - .4 Ijin Melakukan PHK
  - .5 Perhitungan Masa Kerja bagi Pekerja yang di PHK
  - .6 Pemberian Uang Tunggu bagi Pekerja yang Di PHK
  - .7 Pemberian Uang Pesangon bagi Pekerja yang di PHK
- 568 Kesejahteraan Pekerja
  - .1 Bantuan Kredit / bantuan Modal Kerja bagi Naker
    - .1 .1 Pemilihan Pekerja Teladan
  - .2 Perumahan Pekerja
  - .3 Keikutsertaan Pekerja dalam Program Jamsostek
  - .4 Koperasi Pekerja
  - .5 Sarana Transportasi Pekerja
  - .6 Perpustakaan Pekerja
  - .7 Tempat Ibadah Pekerja
  - .8 Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
  - .9 Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerjaan
    - .9 .1 Lembaga Kerjasama Bipartid
- 569 Tenaga Kerja Orang Asing
  - .1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
  - .2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
  - .3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
  - .4 Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
  - .5 Data Tenaga Kerja Asing
  - .6 Kecelakaan / Kematian Tenaga Kerja Asing
  - .7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
  - .8 Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
  - .9 Tenaga Kerja Asing Ilegal
- 570 PENANAMAN MODAL
  - .1 Penanaman Modal Dalam Negeri
  - .2 Penanaman Modal Luar Negeri
- 571 Modal Patungan (joint venture/penyertaan modal)
- 572 Pasar Uang dan Modal
- 573 Saham
- 574 Modal Domestik
- 580 PERBANKAN MONETER
- 581 Kredit
- 582 Inventasi
- 583 Tabungan



- .1 Deposito
- .2 Tabanas
- .3 Taska
- .4 Tapelpram
- 584 Bank Pembangunan Daerah
  - .1 Bank Jateng
  - .2 BKK, BPR BKK, Bank Pasar
- 585 Asuransi
  - .1 Dana Kecelakaan Lalu Lintas
  - .2 Polis
  - .3 Premi
  - .4 Tertanggung / Pemegang Polis
  - .5 Uang Pertanggungan
- 586 Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer
- 587 Fiscal
- 588 Hutang Negara Obligasi
- 589 Moneter
  
- 590 AGRARIA
- 591 Tata Guna Tanah
  - .1 Pemetaan dan Pengukuran
  - .2 Perpetaan
  - .3 Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
  - .4 Fatwa Tata Guna Tanah
  - .5 Tanah Kritis
- 592 Landreform
  - .1 Redistribusi
    - .1 .1 Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian
    - .1 .2 Penentuan Tanah Obyek Landreform
    - .1 .3 Pembagian Tanah Landreform
    - .1 .4 Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
  - .2 Ganti Rugi
    - .2 .1 Ganti Rugi Tanah Kelebihan
    - .2 .2 Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
    - .2 .3 Ganti Rugi Tanah Absentee
    - .2 .4 Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
    - .2 .5 Ganti Rugi Tanah Partikelir
    - .2 .6 Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
  - .3 Bagi Hasil
    - .3 .1 Penetapan Imbangan Gadai Tanah
    - .3 .2 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
    - .3 .3 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
  - .4 Gadai Tanah
    - .4 .1 Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
    - .4 .2 Pelaksanaan Gadai Tanah
    - .4 .3 Sengketa Gadai Tanah
  - .5 Bimbingan dan Penyuluhan
  - .6 Pengembangan
  - .7 Yayasan Dana Landreform (YDL)
- 593 Pengurusan Hak-hak Tanah
  - .1 Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
    - .1 .1 Sewa Tanah



- .1 .2 Sewa Tanah untuk Tanaman tertentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus
- .2 Hak Milik
  - .2 .1 Perorangan
  - .2 .2 Badan Hukum
- .3 Hak Pakai
  - .3 .1 Perorangan
    - .3 .1 .1 Warga Negara Indonesia
    - .3 .1 .2 Warga Negara Asing
  - .3 .2 Badan Hukum
    - .3 .2 .1 Badan Hukum Indonesia
    - .3 .2 .2 Badan Hukum Asing, Kedutaan Konsulat, Kantor Dagang Asing
  - .3 .3 Tanah Gedung-Gedung Negeri
- .4 Guna Usaha
  - .4 .1 Perkebunan Besar
  - .4 .2 Perkebunan Rakyat
  - .4 .3 Peternakan
  - .4 .4 Perikanan
  - .4 .5 Kehutanan
- .5 Hak Guna Bangunan
  - .5 .1 Perorangan
  - .5 .2 Badan Hukum
  - .5 .3 P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda)
  - .5 .4 Badan Hukum Asing Belanda-PBK No. 5/56
  - .5 .5 Pemulihan Hak (Pen Pres 4 / 1960)
- .6 Hak Pengelolaan
  - .6 .1 PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate
  - .6 .2 Perusahaan daerah Pembangunan Perumahan
- .7 Sengketa Tanah
  - .7 .1 Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)
- .8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah
  - .8 .1 Pencabutan Hak
  - .8 .2 Pembebasan Tanah
  - .8 .3 Ganti Rugi Tanah
- 594 Pendaftaran Tanah
  - .1 Pengukuran / Pemetaan
    - .1 .1 Fotogrametri
    - .1 .2 Terrestrial
    - .1 .3 Triangulasi
    - .1 .4 Peralatan
  - .2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 6 / 1960)
  - .3 Sertifikat
  - .4 Pejabat Pembuatan Akte Tanah
- 595 Transmigrasi
  - .1 Tata Guna Tanah
  - .2 Landreform
  - .3 Pengurusan Hak-hak Tanah
  - .4 Pendaftaran Tanah
- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
- 601 Tata Bangunan Konstruksi dan Industri Konstruksi





- 602 Kontraktor Pemborong
  - .1 Tender
  - .2 Penunjukan
  - .3 Prakuafifikasi
    - .3 .1 Daftar Rekanan Mampu (DRM)
    - .3 .2 Tanda Daftar Rekanan (TDR)
- 603 Arsitektur
- 604 Bahan Bangunan
  - .1 Tanah dan Batu
  - .2 Aspal
  - .3 Besi dan logam lainnya
    - .3 .1 Besi beton
    - .3 .2 Besi Profil (konstruksi)
    - .3 .3 Paku
    - .3 .4 Alumunium profil
  - .4 Bahan-bahan perlindungan dan pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu)
  - .5 S e m e n
  - .6 K a y u
  - .7 Bahan penutup Atap
  - .8 Alat-alat penggantung dan pengunci
  - .9 Bahan -bahan bangunan lainnya
- 605 I n s t a l a n s i
  - .1 Instalansi bangunan
  - .2 Instalansi listrik
  - .3 Instalansi air/sanitasi
  - .4 Instalansi pengatur udara
  - .5 Instalansi akustik
  - .6 Instalansi cahaya/penerangan
- 606 Konstruksi pencegahan
  - .1 Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran
  - .2 Terhadap gempa
  - .3 Terhadap angin/udara/panas
  - .4 Terhadap Kegaduhan
  - .5 Terhadap gas/explosive
  - .6 Terhadap serangga
  - .7 Terhadap radiasi atom
- 610 P E N G A I R A N
- 611 Irigasi
  - .1 Bangunan Waduk
    - .1 .1 Bendungan
    - .1 .2 Tanggul
    - .1 .3 Pelimpahan banjir
    - .1 .4 Menara pengambilan
    - .1 .5 Pembangunan dermaga
  - .2 Bangunan pengambilan
    - .2 .1 Bendungan
    - .2 .2 Bendungan dengan pintu bilas
    - .2 .3 Bendungan dengan pompa
    - .2 .4 Pengambilan bebas
    - .2 .5 Pengambilan bebas dengan pompa



- .2 .6 Sumur dengan pompa
- .2 .7 Kantung lumpur
- .2 .8 Silt ekstretor
- .2 .9 Escope channel
- .3 Bangunan pembawa
  - .3 .1 Saluran
    - .3 .1 .1 Saluran Induk
    - .3 .1 .2 Saluran Sekunder
    - .3 .1 .3 Suplesi
    - .3 .1 .4 Tersier
    - .3 .1 .5 Saluran kwarter
    - .3 .1 .6 Saluran pasangan
    - .3 .1 .7 Saluran tertutup / terowongan
  - .3 .2 Bangunan
    - .3 .2 .1 Bangunan pagi
    - .3 .2 .2 Bangunan dan sadap
    - .3 .2 .3 Bangunan sadap
    - .3 .2 .4 Bangunan check
    - .3 .2 .5 Bangunan Terjun
  - .3 .3 Bax Tersier
  - .3 .4 Got miring
  - .3 .5 Talang
  - .3 .6 Syphon
  - .3 .7 Gorong-gorong
  - .3 .8 Pelimpahan samping
- .4 Bangunan Pembangunan
  - .4 .1 Saluran
    - .4 .1 .1 Saluran Pembuangan Induk
    - .4 .1 .2 Saluran Pembuangan Sekunder
    - .4 .1 .3 Saluran Pembangunan Tersier
  - .4 .2 Bangunan
    - .4 .2 .1 Bangunan Out let
    - .4 .2 .2 Bangunan terjun
    - .4 .2 .3 Bangunan penahan banjir
  - .4 .3 Gorong-gorong pembuangan
  - .4 .4 Talang Pembuangan
  - .4 .5 Syphon pembuangan
- .5 Bangunan Lainnya
  - .5 .1 Jalan
    - .5 .1 .1 Jalan Inspeksi
    - .5 .1 .2 Jalan Logistik
  - .5 .2 Jembatan
    - .5 .2 .1 Jembatan inspeksi
    - .5 .2 .2 Jembatan hewan
  - .5 .3 Tangga cuci
  - .5 .4 Kubangan kerbau
  - .5 .5 Waduk lapangan
  - .5 .6 Bangunan penunjang
  - .5 .7 Jaringan telepon
  - .5 .8 Stasiun Argo
  - .5 .9 Bangunan TPI dan pasar iklan



- .1 Tanggul keliling
  - .1 .1 Tanggul
  - .1 .2 Bangunan penutup sungai
  - .1 .3 Jembatan
- .2 Bangunan pembawa
  - .2 .1 Saluran
    - .2 .1 .1 Saluran muka
    - .2 .1 .2 Saluran pembawa induk
    - .2 .1 .3 Saluran pembawa sekunder
    - .2 .1 .4 Saluran stasium pompa pemasukan
  - .2 .2 Bangunan bagi :
    - .2 .2 .1 Gorong-gorong
    - .2 .2 .2 Syphon
- .3 Bangunan pembuangan
  - .3 .1 Stasiun pompa pembangunan
  - .3 .2 Saluran
    - .3 .2 .1 Saluran pembawa induk
    - .3 .2 .2 Saluran pembawa sekunder
    - .3 .2 .3 Saluran Pembuangan Induk
    - .3 .2 .4 Saluran Pembuangan Sekunder
  - .3 .3 Pintu air pembuangan
  - .3 .4 Gorong-gorong pembuangan
  - .3 .5 Syphon pembuangan
- .4 Bangunan lainnya
  - .4 .1 Bangunan
    - .4 .1 .1 Bangunan pengukur air
    - .4 .1 .2 Bangunan Pengukur Curah Hujan
    - .4 .1 .3 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
    - .4 .1 .4 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
  - .4 .2 Rumah Petugas Eksploitasi

## 613 Pasang surut

- .1 Bangunan pembawa
  - .1 .1 Saluran
    - .1 .1 .1 Saluran Pembawa Induk
    - .1 .1 .2 Saluran Pembawa Sekunder
    - .1 .1 .3 Saluran Pembawa Tersier
    - .1 .1 .4 Saluran Penyimpanan Air
    - .1 .1 .5 Saluran Pintu Pembuangan
  - .2 Bangunan pembuangan
    - .2 .1 Saluran
      - .2 .1 .1 Saluran Pembawa Induk
      - .2 .1 .2 Saluran Pembawa Sekunder
      - .2 .1 .3 Saluran Pembawa Tersier
      - .2 .1 .4 Saluran Penyimpanan Air
      - .2 .1 .5 Saluran Pintu Pembuangan
      - .2 .1 .6 Saluran Pembuang Induk
      - .2 .1 .7 Saluran Pembuang Sekunder
      - .2 .1 .8 Saluran Pembuang Tersier
      - .2 .1 .9 Saluran Pengumpul Air
    - .2 .2 Bangunan Pintu Pembuang
  - .3 Bangunan lainnya
    - .3 .1 Kolom pasang



- .3 .2 Saluran
  - .3 .2 .1 Saluran Lalu Lintas
  - .3 .2 .2 Saluran Muka
- .3 .3 Bangunan
  - .3 .3 .1 Bangunan Penangkis Kotoran
  - .3 .3 .2 Bangunan Pengukur Muka air
  - .3 .3 .3 Bangunan Pengukur Curah Hujan
- .3 .4 Jalan
- .3 .5 Jembatan
- 614 Pengendalian Sungai
  - .1 Bangunan pengaman
    - .1 .1 Tanggul banjir
    - .1 .2 Pintu Pengatur Banjir
    - .1 .3 Klep Pengatur Banjir
    - .1 .4 Tembok pengaman talut
    - .1 .5 K r i b
    - .1 .6 Kantung lumpur
    - .1 .7 Check Dam
    - .1 .8 Syphon
  - .2 Saluran Pengaman
    - .2 .1 Saluran Banjir
    - .2 .2 Saluran Drainage
    - .2 .3 Corepure
  - .3 Bangunan lainnya
    - .3 .1 Warning System
    - .3 .2 Stasiun
      - .3 .2 .1 Stasiun Pengukur curah hujan
      - .3 .2 .2 Stasiun Pengukur Air
      - .3 .2 .3 Stasiun Pengukur Cuaca
      - .3 .2 .4 Stasiun Pos Penjagaan
- 615 Pengaman Pantai
  - .1 Tanggul
  - .2 K r i b
  - .3 Bangunan lainnya
- 616 Air Permukaan (Danau, Waduk, Sungai)
  - .1 Stasiun Pompa
  - .2 Bangunan Pembawa
  - .3 Bangunan Pembuangan
  - .4 Bangunan lainnya
- 620 J A L A N
- 621 Jalan Kota / Kabupaten
  - .1 Daerah Penguasaan
    - .1 .1 T a n a h
    - .1 .2 Tanaman
    - .1 .3 Bangunan
  - .2 Bangunan Sementara
    - .2 .1 Jalan Sementara
    - .2 .2 Jembatan Sementara
    - .2 .3 Kantor Proyek
    - .2 .4 Gedung Proyek
    - .2 .5 Barak Kerja



- .2 .6 Laboratorium Lapangan
- .2 .7 R u m a h
- .3 Badan Jalan
- .3 .1 Pekerjaan Tanah (earth work)
- .3 .2 Stabilisasi
- .4 Perkerasan
- .4 .1 Lapisan Pondasi Bawah
- .4 .2 Lapisan Pondasi
- .4 .3 Lapisan Permukaan
- .5 Drainage
- .5 .1 Parit Tanah
- .5 .2 Gorong-gorong (culvert)
- .6 Buku Trotoir
- .6 .1 Tanah
- .6 .2 Perkerasan
- .6 .3 Pasangan
- .7 M e d i u m
- .7 .1 T a n a h
- .7 .2 Tanaman
- .7 .3 Perkerasan
- .7 .4 Pasangan
- .8 Daerah Sampingan
- .8 .1 Tanaman
- .8 .2 Pagar
- .9 Bangunan Pelengkap dan Pengaman
- .9 .1 Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas
- .9 .2 Lampu Penerangan
- .9 .3 Lampu Pengaturan Lalu Lintas
- .9 .4 Patok-patok KM
- .9 .5 Patok-patok R.O.W. (Sempadan)
- .9 .6 Rel Pengamanan
- .9 .7 P a g a r
- .9 .8 Turap Penahan
- .9 .9 Bronjong
- 622 Jalan Provinsi
- 1 Daerah Penguasaan
- .1 .1 Tanah
- .1 .2 Tanaman
- .1 .3 Bangunan
- .1 .4 Jalan Sementara
- .1 .5 Jembatan Sementara
- .1 .6 Kantor / Gedung Proyek
- .1 .7 Barak kerja
- .1 .8 Laboratorium lapangan
- .1 .9 Rumah
- .2 Badan Jalan
- .2 .1 Pekerjaan Tanah (earth work)
- .2 .2 Stabilisasi
- .3 Perkerasan (Pavement)
- .3 .1 Lapis Pondasi Bawah
- .3 .2 Lapis Pondasi
- .3 .3 Lapis Permukaan



- .4 Drainage
  - .4 .1 Parit
  - .4 .2 Gorong-gorong (culvert)
  - .4 .3 Buku Trotoir
  - .4 .4 Tanah
  - .4 .5 Perkerasan
- .5 Trotoir
  - .5 .1 Tanah
  - .5 .2 Perkerasan
- .6 Medium
  - .6 .1 Tanah
  - .6 .2 Tanaman
  - .6 .3 Perkerasan
  - .6 .4 Pasangan
- .7 Daerah Sampingan
  - .7 .1 Tanaman
  - .7 .2 Pagar
- .8 Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan
  - .8 .1 Rambu-rambu
  - .8 .2 Lampu Penerangan
  - .8 .3 Lampu Pengaturan Lalu Lintas
  - .8 .4 Patok-patok KM
  - .8 .5 Patok-patok R.O.W. (Sempadan)
  - .8 .6 Rel Pengamanan
  - .8 .7 Pagar
  - .8 .8 Turap Penahan
  - .8 .9 Bronjong
- .9 Bangunan Sementara
  - .9 .1 Jalan Sementara
  - .9 .2 Jembatan Sementara
  - .9 .3 Kantor Proyek
  - .9 .4 Gudang Proyek
  - .9 .5 Barak Kerja
  - .9 .6 Laboratorium Lapangan
  - .9 .7 Rumah
- 623 Jalan Nasional
  - .1 Daerah Penguasaan
  - .2 Badan Jalan
  - .3 Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan)
  - .4 Drainase (gorong-gorong, parit)
  - .5 Median
  - .6 Daerah samping (pagar, tanaman)
  - .7 Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)
- 630 JEMBATAN
- 631 Jembatan pada jalan Kota/Kabupaten
  - .1 Daerah Penguasaan
    - .1 .1 Tanah
    - .1 .2 Tanaman
    - .1 .3 Bangunan
  - .2 Bangunan Sementara
    - .2 .1 Jalan Sementara



- .2 .2 Jembatan Sementara
- .2 .3 Kantor Proyek
- .2 .4 Gedung Proyek
- .2 .5 Barak kerja
- .2 .6 Laboratorium lapangan
- .2 .7 Rumah
- .3 Pekerjaan Tanah (earth work)
- .3 .1 Galian Tanah
- .3 .2 Timbunan Tanah
- .4 Pondasi
- .4 .1 Pondasi kepala jembatan
- .4 .2 Pondasi pilar
- .4 .3 Pondasi angker
- .5 Bangunan bawah
- .5 .1 Kepala Jembatan
- .5 .2 Pilar
- .5 .3 Pilon
- .5 .4 Landasan
- .6 Bangunan
- .6 .1 Gelagar
- .6 .2 Lantai
- .6 .3 Perkerasan
- .6 .4 Jalan orang / trotoir
- .6 .5 Sandaran
- .6 .6 Talang air
- .7 Bangunan pengaman
- .7 .1 Turap/penahan
- .7 .2 Bronjong
- .7 .3 Strek Dam
- .7 .4 Kist Dam
- .7 .5 Coupute
- .7 .6 Krip
- .8 Bangunan Pelengkap
- .8 .1 Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas
- .8 .2 Patok pengamanan
- .8 .3 Patok R.O.W
- .9 Oprit
- .9 .1 Badan
- .9 .2 Perkerasan
- .9 .3 Drainage
- .9 .4 Baku
- .9 .5 Mediun
- 632 Jembatan pada Jalan Provinsi
- .1 Daerah Penguasaan
- .1 .1 Tanah
- .1 .2 Tanaman
- .1 .3 Bangunan
- .2 Bangunan Sementara
- .2 .1 Jalan Sementara
- .2 .2 Jembatan Sementara
- .2 .3 Kantor Proyek
- .2 .4 Gedung Proyek



- .2 .5 Barak kerja
- .2 .6 Laboratorium lapangan
- .2 .7 Rumah
- .3 Pekerjaan Tanah (earth work)
  - .3 .1 Galian Tanah
  - .3 .2 Timbunan Tanah
- .4 Pondasi
  - .4 .1 Pondasi kepala jembatan
  - .4 .2 Pondasi Pilar
  - .4 .3 Pondasi angker
- .5 Bangunan bawah
  - .5 .1 Kepala Jembatan
  - .5 .2 Pilar
  - .5 .3 Piloon
  - .5 .4 Landasan
- .6 Bangunan
  - .6 .1 Gelagar
  - .6 .2 Lantai
  - .6 .3 Perkerasan
  - .6 .4 Jalan orang / trotoir
  - .6 .5 Sandaran
  - .6 .6 Talang air
- .7 Bangunan Pengaman
  - .7 .1 Turap / Penahan
  - .7 .2 Bronjong
  - .7 .3 Strek Dam
  - .7 .4 Kist Dam
  - .7 .5 Coupute
  - .7 .6 Krip
- .8 Bangunan Pelengkap
  - .8 .1 Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas
  - .8 .2 Patok pengamanan
  - .8 .3 Patok R.O.W (sempadan)
- .9 Oprit
  - .9 .1 Badan
  - .9 .2 Perkerasan
  - .9 .3 Drainage
  - .9 .4 Baku
  - .9 .5 Mediun
- 633 Jembatan pada jalan Nasional
  - 1 Daerah Penguasaan (tanah, tanaman, bangunan)
  - .2 Bangunan Sementara (gudang proyek, kantor proyek)
  - .3 Pondasi
  - .4 Bangunan bawah
  - .5 Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan)
  - .6 Bangunan Pengaman (bronjong strek dam, krib)
  - .7 Bangunan pelengkap dan pengaman (rambu-rambu)
- 640 BANGUNAN
- 641 Bangunan Pemerintah
  - .1 Gedung Pengadilan
  - .2 Rumah Pejabat Negara





- .3 Gedung DPR
- .4 Gedung Balai Kota
- .5 Penjara
- .6 Perkantoran
- 642 Bangunan Pendidikan
  - .1 Taman Kanak-kanak
  - .2 SD & Sekolah Menengah
  - .3 Perguruan Tinggi
- 643 Bangunan Rekreasi
  - .1 Bangunan Olah Raga
  - .2 Gedung Kesenian
  - .3 Gedung Pemancar
- 644 Bangunan Perdagangan
  - .1 Pusat Perbelanjaan
  - .2 Gedung Perdagangan
  - .3 B a n k
  - .4 Perkantoran
- 645 Bangunan Pelayanan Umum
  - .1 Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum
  - .2 Gedung Parkir
  - .3 Rumah Sakit
  - .4 Gedung Telkom
  - .5 Terminal Angkutan Umum
  - .6 Terminal Angkutan Air
  - .7 Terminal Angkutan Darat
  - .8 Bangunan Keagamaan
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
  - .1 Monumen
  - .2 Candi
  - .3 Kraton
  - .4 Rumah Tradisional
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
  - .1 Rumah Perkantoran
    - .1 .1 Inti / sederhana
    - .1 .2 Sedang / Mewah
  - .2 Rumah Pedesaan
    - .2 .1 Rumah Contoh
  - .3 Real Estate
- 649 Elemen Bangunan
  - .1 Pondasi
    - .1 .1 Diatas Tiang
  - .2 Dinding
    - .2 .1 Penahan beban
    - .2 .2 Tidak menahan beban
  - .3 A t a p
  - .4 Lantai / langit-langit
    - .4 .1 Suspended
    - .4 .2 Solit
  - .5 Pintu / Jendela
    - .5 .1 Pintu Hermonik
    - .5 .2 Pintu biasa



- .5 .3 Pintu Sorong
- .5 .4 Jendela Kayu
- .5 .5 Jendela Sorong
- .5 .6 Jendela Vertikal
  
- 650 TATA RUANG KOTA
- 651 Daerah Perdagangan / pelabuhan
  - .1 Daerah Pusat Perbelanjaan
  - .2 Daerah Perkantoran
- 652 Daerah Pemerintahan
- 653 Daerah Perumahan (site & servei)
  - .1 Kepadatan Rendah (low density)
  - .2 Kepadatan Tinggi (high density)
- 654 Daerah Industri
  - .1 Industri Berat
  - .2 Industri Ringan
  - .3 Industri Rumah (home industri)
- 655 Daerah Rekreasi (open spece)
  - .1 Publik Garden
  - .2 Sport & playing fields
  - .3 Open Space
- 656 Transportasi (tata letak)
  - .1 Jaringan jalan
    - .1 .1 Penerangan Jalan
  - .2 Jaringan Kereta Api
  - .3 Jaringan Sungai
- 657 Assineering
  - .1 Saluran Pengumpulan
  - .2 Instansi Pengolahan
    - .2 .1 Bangunan
    - .2 .2 Bangunan Penyaring
    - .2 .3 Bangunan Penghancur Kotoran
    - .2 .4 Bangunan Pengendapan
    - .2 .5 Bangunan Pengereng Lumpur
    - .2 .6 Unit Disinfektan
    - .2 .7 Unit Perpompaan
- 658 Kesehatan Lingkungan
  - .1 Persampahan
    - .1 .1 Bangunan Pengumpulan
    - .1 .2 Bangunan Pemusnahan
  - .2 Pengotoran Udara
  - .3 Pengotoran Air
    - .3 .1 Air Buangan Industri
  - .4 Kegaduhan
  - .5 Kebersihan kota
  
- 660 TATA LINGKUNGAN
  - 1 Lingkungan Hidup
  - .2 Kebersihan Lingkungan
  - .3 Pencemaran
    - .3 .1 Pencemaran Air
    - .3 .2 Pencemaran Udara
    - .3 .3 Pencemaran Tanah

- .3 .4 Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
- 661 Kerusakan Lingkungan
  - .1 Konservasi Pesisir dan Laut
  - .2 Konservasi Sumber Daya Alam
- 662 Pentataan Hukum Lingkungan
- 663 Laboratorium Lingkungan
  - .1 Air
  - .2 Udara
  - .3 Tanah
- 664 Analisis Dampak Lingkungan
- 665 Pengembangan Teknologi Lingkungan
- 666 Pengembangan Kapasitas
- 667 Pengamanan Lingkungan
- 668 Pusat Pertumbuhan
- 669 Daerah Hutan
  
- 670 KETENAGAAN
  - .1 Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
- 671 Listrik
  - .1 Kelistrikan
    - .1 .1 Perijinan
    - .1 .2 Rekomendasi
    - .1 .3 Pembinaan dan Pengawasan
    - .1 .1 Kelistrikan PLN
    - .1 .2 Kelistrikan non PLN
  - .2 Pembangkit Tenaga Listrik
    - .2 .1 PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
    - .2 .2 PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
    - .2 .3 PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas
    - .2 .4 PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
    - .2 .5 PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
    - .2 .6 PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
    - .2 .7 PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
  - .3 Transmisi Tenaga Listrik
    - .3 .1 Gardu Induk / gardu penghubung / gardu trafo
    - .3 .2 Saluran Udara Tenaga Listrik
    - .3 .3 Kabel Bawah Tanah
  - .4 Distribusi Tenaga Listrik
    - .4 .1 Gardu Distribusi
    - .4 .2 Tegangan Menengah
    - .4 .3 Tegangan Rendah
    - .4 .4 Jaringan Bawah Tanah
  - .5 Pengusahaan Listrik
    - .5 .1 Sambungan Listrik
    - .5 .2 Penjualan Tenaga Listrik
    - .5 .3 Tarif Listrik
- 672 Tenaga Air
- 673 Tenaga Minyak
- 674 Tenaga Gas
- 675 Tenaga Matahari
- 676 Tenaga Nuklir
- 677 Tenaga Panas Bumi





- 678 Tenaga Uap
- 679 Tenaga Lainnya
- 680 PERALATAN PEKERJAAN UMUM
- 690 AIR MINUM
- 691 Intako
  - .1 Bromcaptering
  - .2 Sumur
  - .3 Bendungan
  - .4 Saringan (screen)
  - .5 Pintu air
  - .6 Saluran Pembawa
  - .7 Alat ukur
  - .8 Perpompaan
- 692 Transmisi Air Baku
  - .1 Perpipaan
  - .2 Katup Udara (Air Rolief)
  - .3 Tutup penguras (Blow oof)
  - .4 Bak Pelepas tekanan
  - .5 Jembatan pipa
  - .6 syphon
- 693 Instalasi Pengelolaan
  - .1 Bangunan Ukur
  - .2 Bangunan Aerasi
  - .3 Bangunan Pengendapan
  - .4 Bangunan Pembubuh bahan kimia
  - .5 Bangunan Pengaduk
  - .6 Bangunan Saringan
  - .7 Perpompaan
  - .8 Clear Hell
- 694 Distribusi
  - .1 Reservoir menara bawah tanah
    - .1 .1 Menara
    - .1 .2 Reservoir menara bawah tanah
  - .2 Perpipaan
  - .3 Perpompaan
  - .4 Jembatan pipa
  - .5 syphon
  - .6 Hydran
    - .6 .1 Hydran Umum
    - .6 .2 Hydran Kebakaran
  - .7 Katup Udara (Air Rolief)
    - .7 .1 Katup Udara (air relief)
    - .7 .2 Katup pelepas (blow off)
  - .8 Bak pelepas tekanan (pressuer reducing valve)
- 700 PENGAWASAN
  - .1 Kebijakan dan program pengawasan
  - .2 Pengawasan perencanaan pengadaan / proyek
- 701 Bidang Urusan Dalam
- 702 Bidang Peralatan
- 703 Bidang Kekayaan Daerah



- .1 Pengawasan Inventarisasi Asset
- 704 Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi
- .1 Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen
- 705 Bidang Perencanaan
- 706 Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan
- .1 Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana
- 707 Bidang Penelitian
- .1 Pengawasan Penelitian / Riset
- 708 Bidang Konferensi
- .1 Pengawasan Pertahanan/ BPN
- 709 Bidang Perjalanan Dinas
- .1 Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi
  
- 710 BIDANG PEMERINTAHAN
- 711 Bidang Pemerintahan Pusat
- 712 Pengawasan Pemerintahan Provinsi
- 713 Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 714 Pengawasan Pemerintahan Desa
- 715 Bidang MPR/DPR
- 716 Bidang DPRD Provinsi
- 717 Bidang DPRD Kabupaten/Kota
- 718 Bidang Hukum
- 719 Bidang Hubungan Luar Negeri
  
- 720 BIDANG POLITIK
- 721 Pengawasan Partai termasuk pendanaan partai, atribut partai dll
- 722 Pengawasan Pembinaan ipoleksosbud hankam
- 723 Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh / tani dan kepemudaan
- 724 Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME
- 725 Bidang Pemuda
- 726 Bidang Pemilihan Umum
  
- 730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
- 731 Pengawasan Kesbangpolinmas
- 732 Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (SAR)
- 733 Bidang Pertahanan
- 734 Bidang Kemiliteran
- 735 Bidang Perlindungan Masyarakat
- 736 Bidang Keamanan
- 737 Bidang Kejahatan
- 738 Bidang Bencana
- 739 Bidang Kecelakaan
  
- 740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 741 Pengawasan Pembangunan Desa
- 742 Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
- 743 Pengawasan Kebudayaan
- 744 Pengawasan Kesehatan / Makanan / Obat
- 745 Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)
- 746 Pengawasan Kesejahteraan Sosial
- 747 Pengawasan Kependudukan Migrasi / Urbanisasi

748 Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran  
749 Pengawasan Bantuan / Subsidi Masyarakat



750 BIDANG PEREKONOMIAN

751 Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian  
752 Pengawasan Pertanian dan Perkebunan  
753 Pengawasan Kehutanan  
754 Pengawasan Pertambangan / ESDM  
755 Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan  
756 Pengawasan Kenaga Kerja dan Ketransmigrasian  
757 Pengawasan PMDN / PMA  
758 Pengawasan Perbankan / Moneter  
759 Pengawasan Kelautan dan Perikanan

760 BIDANG PEKERJAAN UMUM

761 Pengawasan Pengairan  
762 Pengawasan Jalan  
763 Pengawasan Jembatan  
764 Pengawasan Bangunan  
765 Pengawasan Tata Ruang Kota  
766 Pengawasan Tata Lingkungan  
767 Pengawasan Ketenagaan  
768 Pengawasan Air Minum

770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK

771 Penyimpangan Pejabat Publik

780 BIDANG KEPEGAWAIAN

781 Bidang Pengadaan PNS  
    .1 Pengawasan Pengadaan PNS  
    .2 Persengketaan PNS  
782 Bidang Mutasi Pegawai  
783 Bidang Kedudukan Pegawai  
    .1 Penyimpangan Pejabat Publik  
784 Bidang Kersejahteraan Pegawai  
785 Bidang Cuti  
786 Bidang Penilaian  
    .1 Pengawasan Penilaian dan Disiplin  
787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian  
    .1 Keanggotaan PNS dan Parpol

790 BIDANG KEUANGAN

791 Bidang Anggaran  
    .1 Pengawasan Anggaran  
792 Bidang Otorisasi  
793 Bidang Verifikasi  
794 Bidang Pembukuan  
    .1 Pengawasan Akuntansi  
795 Bidang Perbendaharaan  
    1 Pengawasan Perbendaharaan  
796 Bidang Pembinaan Kebendaharaan  
    .1 Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah  
797 Bidang Pendapatan



- .1 Pengawasan Pendapatan
- 799 Bidang Bendaharaan
  
- 800 KEPEGAWAIAN
  - .1 Perencanaan
  - .2 Penelitian
    - .1 Pengaduan
    - .2 Tim
    - .3 Statistik
    - .4 Peraturan Perundang-undangan
  
- 810 PENGADAAN
- 811 .1 Pendaftaran CPNS
  - .2 Testing
  - .3 Screening
  - Pengumuman tes dan Pemanggilan
- 812 Pengujian Kesehatan
- 813 .1 Pengangkatan CPNS
  - .2 Pengangkatan CPNS Golongan I
  - .3 Pengangkatan CPNS Golongan II
  - Pengangkatan CPNS Golongan III
- 814 Pengangkatan Tenaga Lepas
  - .1 Pengangkatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak
  - .2 Pengangkatan Tenaga Harian
  - .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan
  
- 820 MUTASI
- 821 .1 Pengangkatan
  - .1 .1 Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  - .1 .2 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
  - .1 .3 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II
  - .1 .4 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III
  - .1 .5 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV
  - .1 .6 Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang Cuti diluar Tanggungan Negara
  - .2 .1 Pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
  - .2 .2 Eselon 1
  - .2 .3 Eselon 2
  - .2 .4 Eselon 3
  - .3 Eselon 4
  - Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
- 822 .1 Kenaikan Gaji Berkala
  - .2 PNS Golongan I
  - .3 PNS Golongan II
  - .4 PNS Golongan III
  - PNS Golongan IV
- 823 .1 Kenaikan Pangkat
  - .2 PNS Golongan I
  - .3 PNS Golongan II



- .4 PNS Golongan III
- PNS Golongan IV
- 824 .1 Pemindehan / Pelimpahan / Pembantuan
- .2 PNS Golongan I
- .3 PNS Golongan II
- .4 PNS Golongan III
- .5 PNS Golongan IV
- Lolos Butuh (Mutasi Pegawai dari Instansi Lain)
- 825 Datasering dan Penempatan Kembali
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
- .1 Dalam Negeri
- .2 Luar Negeri
- .3 Tunjangan Belajar
- .4 Penempatan Kembali
- 827 Wajib Militer
- 828 Mutasi Pegawai Instansi Lainnya
  
- 830 KEDUDUKAN
- Peninjauan Masa Kerja
- 831 Perhitungan Masa Kerja
- 832 Penyesuaian Perangkat / Gaji
- .1 PNS Golongan I
- .2 PNS Golongan II
- .3 PNS Golongan III
- .4 PNS Golongan IV
- 833 Penghargaan Ijasah (pencantuman gelar)
- 834 Penghargaan Lainnya
  
- 840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
- 841 .1 Tunjangan
- .2 Struktural dan Fungsional
- .3 Kehormatan
- .4 Dana Kematian (uang duka)
- .5 Tambahan Penghasilan
- Tunjangan Cacat
- 842 D a n a
- .1 Taspen
- .2 Akses, Bantuan kesehatan
- .3 Bantuan Pendidikan
- 843 Perawatan Kesehatan
- .1 Poliklinik, Klinik Konsultasi
- .2 Perawatan Dokter
- .3 Obat-obatan
- .4 Keluarga Berencana
- 844 Koperasi
- .1 Distribusi Pangan
- .2 Distribusi Sandang
- .3 Distribusi Lainnya
- 845 Perumahan PNS
- .1 Perumahan Pegawai
- .2 Tanah Kamplang
- .3 Losmen/Hotel





- 846 Bantuan Sosial
  - .1 Bantuan Kebakaran
  - .2 Bantuan Kebanjiran
- 847 Rekreasi
- 848 Dispensasi
- 850 C U T I
- 851 Cuti Tahunan
- 852 Cuti Besar
- 853 Cuti Sakit
- 854 Cuti Hamil
- 855 Cuti Naik Haji
- 856 Cuti Diluar Tanggungan Negara
- 857 Cuti Alasan Lain, Cuti Alasan Penting
  
- 860 PENILAIAN
- 861 Penghargaan
  - .1 Bintang / Satyalencana Karya Satya
  - .2 Kenaikan Pangkat Anumerta
  - .3 Hadiah Berupa Kenaikan Pangkat
  - .4 Pegawai Teladan
- 862 Hukuman
  - .1 Teguran Peringatan
  - .2 Penundaan Kenaikan Gaji
  - .3 Penurunan Pangkat
  - .4 Pemindahan
  - .5 Ringan
  - .6 Sedang
  - .7 Berat
- 863 Konduite / DP3
- 864 Ujian Dinas
  - .1 Tingkat I
  - .2 Tingkat II
  - .3 Tingkat 3
- 865 Penilaian Kinerja
  - .1 Struktural
  - .2 Fungsional
- 866 Rehabilitasi
  
- 870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN
- 871 Formasi
- 872 Bezetting / Daftar Urut Kepegawaian
- 873 Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian
  - .1 NIP
  - .2 KARPEG
  - .3 Legitimasi / Tanda Pengenal
  - .4 Daftar Keluarga
  - .5 KARSU / KARIS
- 874 Daftar Riwayat Pekerjaan
  - 1 Tanggal Lahir
  - .2 Penggantian Nama
  - .3 Izin Kepartaian/Organisasi
- 876 Kewenangan Mutasi Kepegawaian



- .1 Pelimpahan Wewenangan
- .2 Spesimen Tanda Tangan
- 877 Penggajian
  - .1 SKPP
- 878 Sumpah/Janji
- 878 Korps Kepegawaian
  
- 880 PEMBERHENTIAN
- 881 Atas Permintaan Sendiri termasuk pengunduran diri
- 882 Dengan Hak Pensiun
  - .1 Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Gol. I
  - .2 Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Gol. II
  - .3 Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Gol. III
  - .4 Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Gol. IV
  - .5 Pensiun Janda / Duda
  - .6 Pensiun Yatim Piatu
  - .7 Uang muka Pensiun
- 883 Karena Meninggal
- 884 Alasan lain, diantaranya Keuzuran Jasmani
- 885 Uang Pesangon
- 886 Uang Tunggu
- 887 Uang Sementara Waktu
  - .1 Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas
- 888 Tidak dengan Hormat
  - .1 Tali Asih Pensiun
  
- 890 PENDIDIKAN PEGAWAI
- 891 Perencanaan Program dan Pelaporan Diklat
- 892 Pendidikan Prajabatan
- 893 Pendidikan dalam Jabatan
  - .1 Diklatpim
  - .2 Diklat Teknis
  - .3 Diklat Fungsional
  - .4 Kursus-kursus, Penataran, Bimbingan Teknis
- 894 Pengembangan Pegawai
  - .1 Tugas Belajar
  - .2 Ijin Belajar
  - .3 Tunjangan Belajar
  - .4 Bantuan Pendidikan
  - .5 Penempatan Kembali
- 895 Metode
  - .1 Kuliah
  - .2 Ceramah, Symposium
  - .3 Diskusi
  - .4 Kuliah Lapangan / OL, Widya Wasta, KKN
  - .5 Kurikulum
  - .6 Karya Tulis
- 896 Tenaga Pengajar, Narasumber
- 897 Administrasi Pendidikan
- 898 Fasilitas Pendidikan
  - .1 Tunjangan Belajar
  - .2 Asrama



- .3 Uang Makan
- .4 Uang Transport
- .5 Uang Buku
- .6 Uang Ujian
- .7 Uang Semester/Uang Kuliah
- .8 Uang Saku
- 899 Sarana Pendidikan
  - .1 Bantuan Sarana Belajar
  - .2 Bantuan Alat Tulis
  - .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya
- 900 KEUANGAN
- 901 Nota Keuangan
- 902 APBN
- 903 APBD
- 904 Dana Alokasi Umum
- 905 Dana Alokasi Khusus
- 910 ANGGARAN
- 911 Keputusan ttg penunjukkan pengelola keuangan SKPD / PPKD
- 912 Keputusan Gubernur ttg Penunjukkan Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat teknis BLUD
- 913 DPA / DPPA / DPAL - SKPD / PPKD
- 914 Anggaran Kas
- 915 Surat Penyediaan Dana (SPD)
- 916 Rutin
- 917 Pembangunan
- 918 Daftar Isi Kegiatan (DIK)
  - .1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
- 919 Daftar Isian Proyek
  - .1 Daftar Usulan Proyek (DUP)
  - .2 Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)
- 920 OTORISASI/SKO
- 921 Rutin
- 922 Pembangunan
- 923 SUP
- 924 Ralat SKO
- 930 AKUNTANSI
- 931 Laporan-laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- 940 PERBENDAHARAAN
- 941 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- 942 Surat Penolakan Penerbitan SP2D
- 943 Daftar Penguji SP2D
- 950 PEMBINAAN PERBENDAHARAAN
- 951 BinteK-binteK / Kursus yang berkaitan dengan Keuangan
- 960 PENGELOLAAN KAS DAERAH
- 961 Laporan Pemotongan IWP, Taperum, PPh 21 dari gaji
- 962 Laporan Rekapitulasi Penerimaan Daerah



- 963 Daftar Pemotongan dan Penyetoran Pajak (PPN / PPh) dari CV / PT / Instansi
- 964 Surat Tanda Setoran (STS)
- 965 Laporan Realisasi Daerah
  - .1 Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
  - .2 Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah
- 966 Rekonsiliasi
  - .1 Surat Rekonsiliasi Penerimaan
  - .2 Laporan Rekonsiliasi Bank
- 967 Laporan Mutasi Penempatan Deposito
- 968 Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)
  
- 970 EVALUASI DAN PENGENDALIAN
- 971 Tuntutan Ganti Rugi
- 972 Tuntutan Perbendaharaan
- 973 Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten / Kota
- 974 Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota
- 975 Edaran -edaran
  
- 980 PENDAPATAN
- 981 Perimbangan Keuangan
  - .1 Bagi Hasil Pajak
    - .1 Pajak Bumi Bangunan (PBB)
    - .2 Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB)
    - .3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Pasal 21)
  - .2 Bagi Hasil Bukan Pajak
    - .1 Sumber Daya Alam / Migas
- 982 Subsidi
- 983 Pajak
  - .1 Pajak Kendaraan Bermotor
  - .2 Pajak Kendaraan Diatas Air
  - .3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - .4 Pajak Pengembalian & Pemanfaatan Air Permukaan
  - .5 Pajak Reklame
- 984 Restribusi
  - .1 Restribusi Bidang Kesehatan
  - .2 Restribusi bidang seni budaya dan pariwisata
  - .3 Restribusi bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan (termasuk pasar)
  - .4 Restribusi bidang pertanian dan peternakan (termasuk pemotongan hewan)
  - .5 Restribusi bidang perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir dll)
  - .6 Restribusi bidang perkebunan dan kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dll)
  - .7 Restribusi bidang perikanan dan kelautan
  - .8 Restribusi bidang pertambangan, pemanfaatan air permukaan dan metrologi
  - .9 Restribusi bidang lainnya (termasuk sampah)
- 985 Bea
  - .1 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - .2 Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air



- 986 Cukai
- 987 Pungutan
- 988 Bantuan
  - .1 Bantuan Presiden
  - .2 Bantuan Menteri
  - .3 Bantuan Gubernur
  - .4 Bantuan Bupati
  - .5 Bantuan Lainnya
- 989 Pendapatan Lainnya
  - .1 Hasil Penjualan asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
    - .1 Pelepasan Hak Atas Tanah
    - .2 Penjualan Rumah Jabatan / Rumah Dinas
    - .3 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2
    - .4 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4
    - .5 Penjualan Bongkaran Bangunan Dan Inventaris
    - .6 Penjualan Drum Bekas
    - .7 Penjualan Hasil Penerbangan Pohon
  - .2 Penerimaan Jasa Giro
    - .1 Jasa Giro Kas Daerah
    - .2 Jasa Giro Pemegang Kas
    - .3 Jasa Giro Khusus
  - .3 Penerimaan Bunga Bank
    - .1 Bunga Deposito
    - .2 Bunga Tabungan
  - .4 Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau Kehilangan Kekayaan
    - .1 Sumbangan Pihak Ke Tiga
    - .2 Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Dealer)
    - .3 Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu
  - .5 Penerimaan Lain-lain
    - .1 Penerimaan kembali kredit BKK
    - .2 Ternak tidak layak bibit
    - .3 Sewa Internet
    - .4 Penerimaan Dari Dana Bergulir / Revolving
    - .5 Kerjasama Dengan BUMIDA
    - .6 Penerimaan DUKS
    - .7 Tempat Rekreasi Nusakambangan
    - .8 Setoran TP-TGR
    - .9 Penerimaan Lainnya dari setda / SKPD

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO